

**ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA RENCANA STRATEGIS TAHUN  
2008-2013 DENGAN RENCANA KERJA TAHUN 2008 DAN 2009  
DI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI  
KABUPATEN BANYUMAS**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disusun Oleh :

**EKA MISRINA**  
**NIM D0105012**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2010**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi Dengan Judul

**ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA RENCANA STRATEGIS TAHUN  
2008-2013 DENGAN RENCANA KERJA TAHUN 2008 DAN 2009  
DI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI  
KABUPATEN BANYUMAS**

Disetujui Untuk Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta, 27 Januari 2010

Mengetahui

Pembimbing Skripsi

Rino Ardhian Nugroho, S.Sos., M.T.I  
NIP. 198005032005011003

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini Telah Diuji dan Disahkan Oleh Panitia Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Hari : Kamis

Tanggal : 04 Februari 2010

**Panitia Ujian Skripsi****Ketua**

1. Drs. H. Marsudi., M.S.  
NIP. 195508231983031001 ( )

**Sekretaris**

2. Dra. Retno Suryawati., M.Si.  
NIP. 196001061987022001 ( )

**Penguji**

3. Rino Ardhian Nugroho, S.Sos., M.T.I.  
NIP. 198005032005011003 ( )

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Drs. Supriyadi , SN., SU  
NIP. 195301281981031001

## MOTTO

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan maka kerjakan urusan selanjutnya dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap*

*(QS. Al Insyirah : 6-8)*

*ALLAH SWT tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya.*

*(Al-Baqarah ayat 286)*

*Belajar, belajar dan belajarlah demi masa depan karena hanya langkah Mu yang kan membawa Mu dalam kesuksesan*

*(Bapak dan Ibu)*

## PERSEMBAHAN



*Karya kecil ini saya persembahkan untuk :*

- ♥ *Bapak dan ibuku tercinta untuk segala cinta, doa dan pengorbanan yang tiada henti.*
- ♥ *Adikku tersayang Heri dan Opi atas kekompakan, kasih sayang dan dukungan dan semangat.*
- ♥ *Almamaterku UNS.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat yang telah melimpahkan berkah, karunia dan hidayah-NYA serta kemudahan jalan yang diberikan-NYA sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Analisis Perbandingan Antara Rencana Strategis Tahun 2008-2013 Dengan Rencana Kerja Tahun 2008 Dan 2009 Di Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Banyumas”**

Skripsi disusun dan diajukan guna memenuhi salah satu syarat akademis untk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rino Ardhian Nugroho, S.Sos., M.T.I selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahannya serta nasehat dan semangat dengan penuh kesabaran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Atas bimbingan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak H. Didik G. Suharto, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Akademis yang telah membimbing penulis selama menempuh masa studi.
3. Drs. H Supriyadi SN, SU selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Drs. Sudarto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara atas ilmu yang diberikan selama ini.
6. Bapak Ir. Didi Rudwianto, S.H., M.si selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas yang telah memberikan ijin penulis melakukan penelitian dan memberikan masukan kepada penulis.
7. Bapak Didik Haridik, NG., ST selaku pembimbing di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas dan Seluruh Staff Sub Bina Program Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas yang telah membimbing dan memberi masukan selama proses penulisan skripsi.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas atas semua bantuannya kepada penulis didalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Sahabatku Atika, wiwit serta semua teman-teman AN 2005 yang selalu menemani dan memberikan semangat.
10. Teman-teman Asrama Putri sari mbak nova, mbak devita, shita, aini, diah dan made yang telah memberi warna dalam perjalanan hidupku atas kebersamaan dan kekompakan selama ini.
11. Ninu ibnu yang telah memberikan semangat dan sabar menemaniku dalam langkah hidupku.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

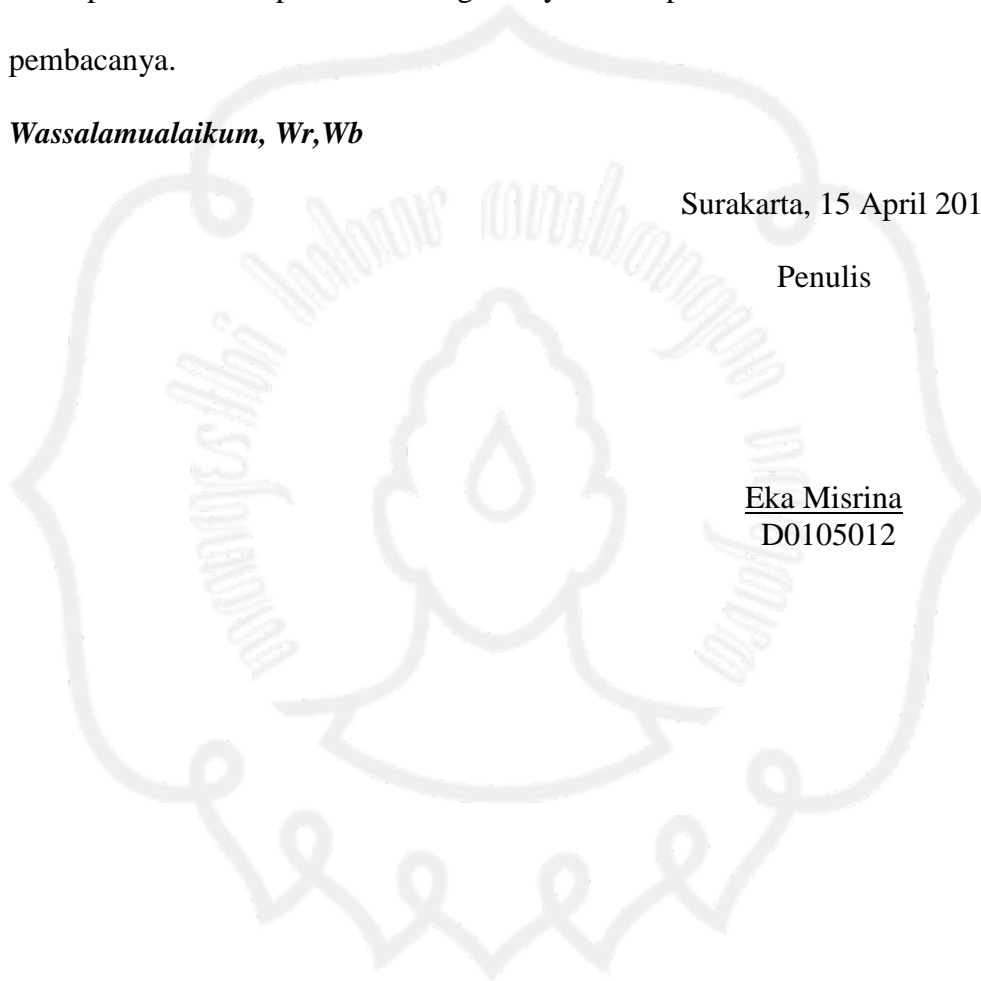
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini banyak kekurangan. Untuk itu penyusun selalu terbuka untuk menerima masukan yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

*Wassalamualaikum, Wr,Wb*

Surakarta, 15 April 2010

Penulis

Eka Misrina  
D0105012





## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	Xvi
DAFTAR GRAFIK.....	Xvii
ABSTRAK.....	Xviii
ABSTRACT.....	Xix
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Tinjauan Pustaka.....	14
1.5.1 Rencana Strategis .....	14
1.5.2 Rencana Kerja .....	32
1.5.3 Program .....	34

1.5.4 Kegiatan .....	36
1.5.5 Analisis Perbandingan antara Renstra terhadap Renja .....	38
1.6 Batasan Konsep Penelitian .....	43
1.7 Kerangka Berfikir.....	44
1.8 Metodologi Penelitian.....	48
1. Jenis Penelitian.....	48
2. Lokasi Penelitian.....	48
3. Jenis Data .....	49
4. Tahapan Penelitian .....	50
5. Teknik Penarikan Sampel.....	51
6. Teknik Pengumpulan Data .....	52
7. Validitas Data .....	54
8. Teknik Analisa Data .....	55
<b>BAB II DESKRIPSI LOKASI</b>	
2.1 Letak Geografis Kabupaten Banyumas.....	58
2.2 Potensi Pendukung Dinperindakop Kabupaten Banyumas.....	61
2.3 Visi dan Misi .....	65
2.4 Tujuan dan Sasaran .....	66
2.5 Landasan Hukum .....	68
2.6 Tugas, Fungsi dan tata Kerja .....	69
2.7 Struktur Organisasi .....	71

2.8 Uraian Tugas .....	74
2.9 Identifikasi Pegawai .....	92

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

3.1 Analisa Dokumen .....	102
3.1.1 Program dan Kegiatan yang terlaksana antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008-2009....	102
3.1.2 Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja tahun 2008-2009.....	106
3.2 Analisa Wawancara .....	116
3.2.1 Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008-2009.....	116
3.2.2 Program dan Kegiatan Tambahan pada Renja Tahun 2008-2009.....	121
3.3 Pembahasan Analisis Perbandingan Renstra Tahun 2008-2013 dan Renja Tahun 2008-2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas.....	123
3.3.1 Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008-2009.....	123
3.3.2 Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana Antara Renstra Tahun 2008-2013	

dengan Renja Tahun 2008-2009.....125

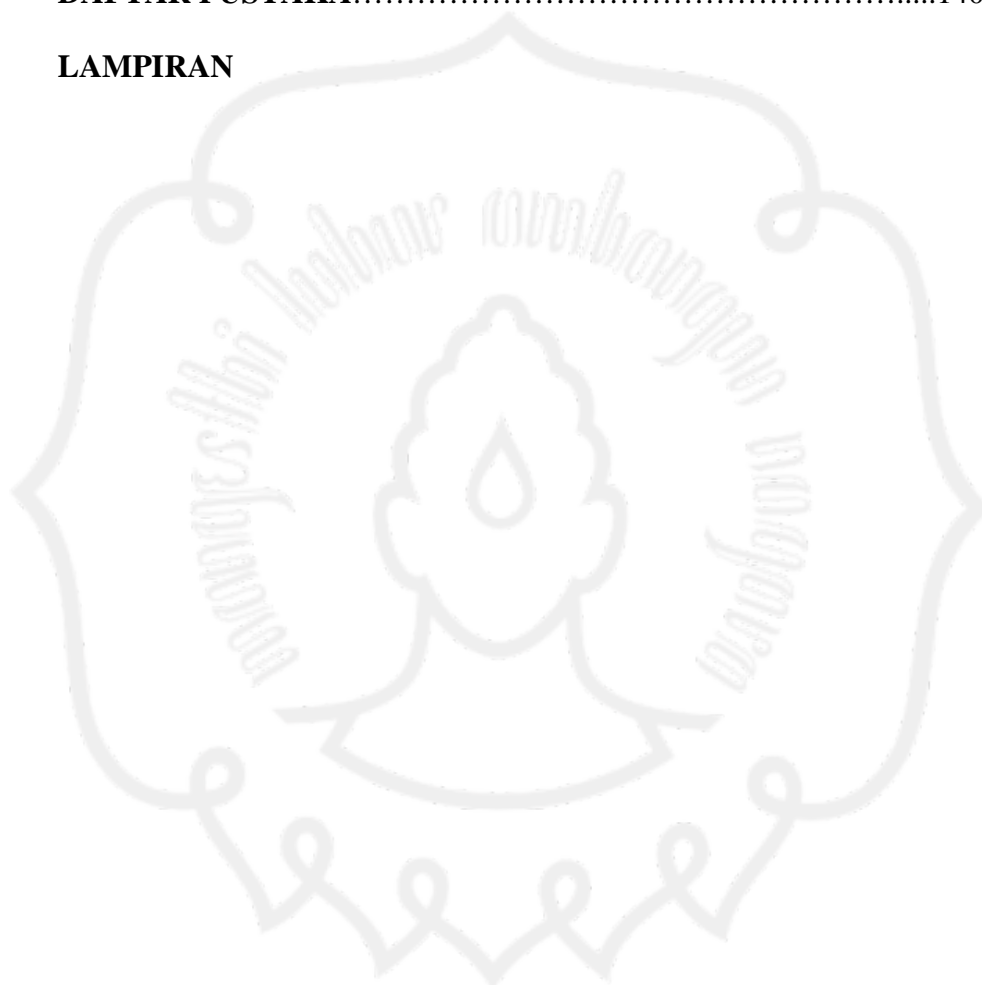
**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan.....134

4.2 Saran.....139

**DAFTAR PUSTAKA.....140**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Skala Besar, Menengah dan Kecil Tahun 2008.....	6
Tabel 1.2 Sosialisasi <i>Input</i> (Dana) APBD Kabupaten Banyumas.....	10
Tabel 2.1 Rekapitulasi Barang Inventaris Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas Tahun 2008.....	62
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas menurut jenis kelamin.....	93
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas menurut tingkat pendidikan.....	94
Tabel 2.4 Penyebaran tingkat pendidikan Pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas....	95
Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas menurut Eselon dan Fungsional.....	95
Tabel 3.1 Jumlah Program dan Kegiatan Renstra Tahun 2008-2013 Dinperindakop Kabupaten Banyumas .....	100
Tabel 3.2 Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008.....	103
Tabel 3.3 Presentase Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana antara Renstra tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008.....	104

Tabel 3.4	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2009.....	105
Tabel 3.5	Presentase Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2009.....	106
Tabel 3.6	Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana antara Renstra tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008.....	108
Tabel 3.7	Presentase Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana antara Renstra tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008.....	108
Tabel 3.8	Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana antara Renstra tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2009.....	109
Tabel 3.9	Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana antara renstra tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2009.....	110
Tabel 3.10	Program dan Kegiatan Tambahan Renja Tahun 2008.....	111
Tabel 3.11	Program dan Kegiatan Tambahan Renja 2009.....	112
Tabel 3.12	Analisis Keterkaitan Jumlah Program dan Kegiatan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008-2009.....	114
Tabel 3.13	Program dan Kegiatan Tambahan pada Renja Tahun 2008-2009..	115
Tabel 3.14	Sosialisasi APBD Kabupaten Banyumas.....	121
Tabel 3.15	Ketidakterkaitan Program dan Kegiatan Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008-2009.....	126
Tabel 3.16	Program dan Kegiatan Tambahan Renja tahun 2008-2009.....	127
Tabel 3.17	Program dan kegiatan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan	

Renja Tahun 2008-2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas..... 129

Tabel 3.18 Perbandingan Jumlah dan prosentase analisis perbandingan

Program dan kegiatan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan

Renja Tahun 2008-2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas..... 131

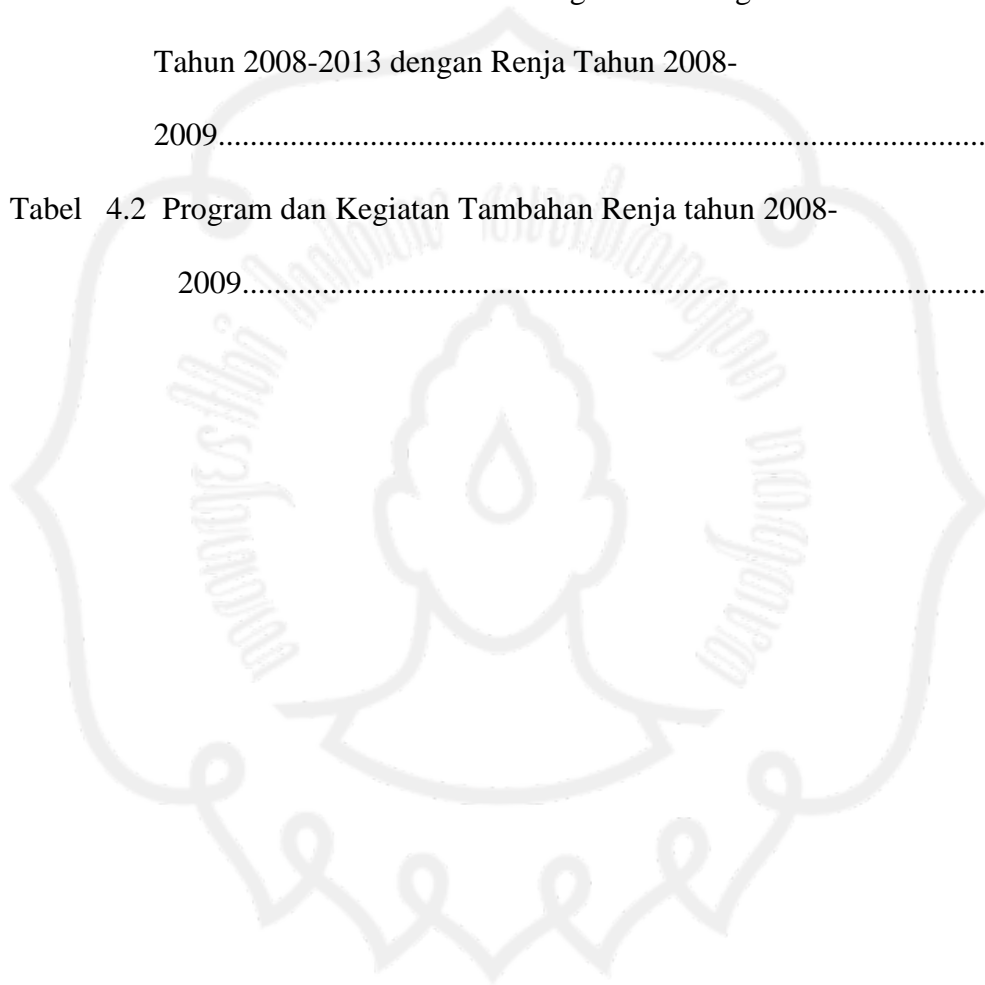
Tabel 4.1 Analisis Keterkaitan Jumlah Program dan Kegiatan antara Renstra

Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008-

2009..... 134

Tabel 4.2 Program dan Kegiatan Tambahan Renja tahun 2008-

2009..... 135



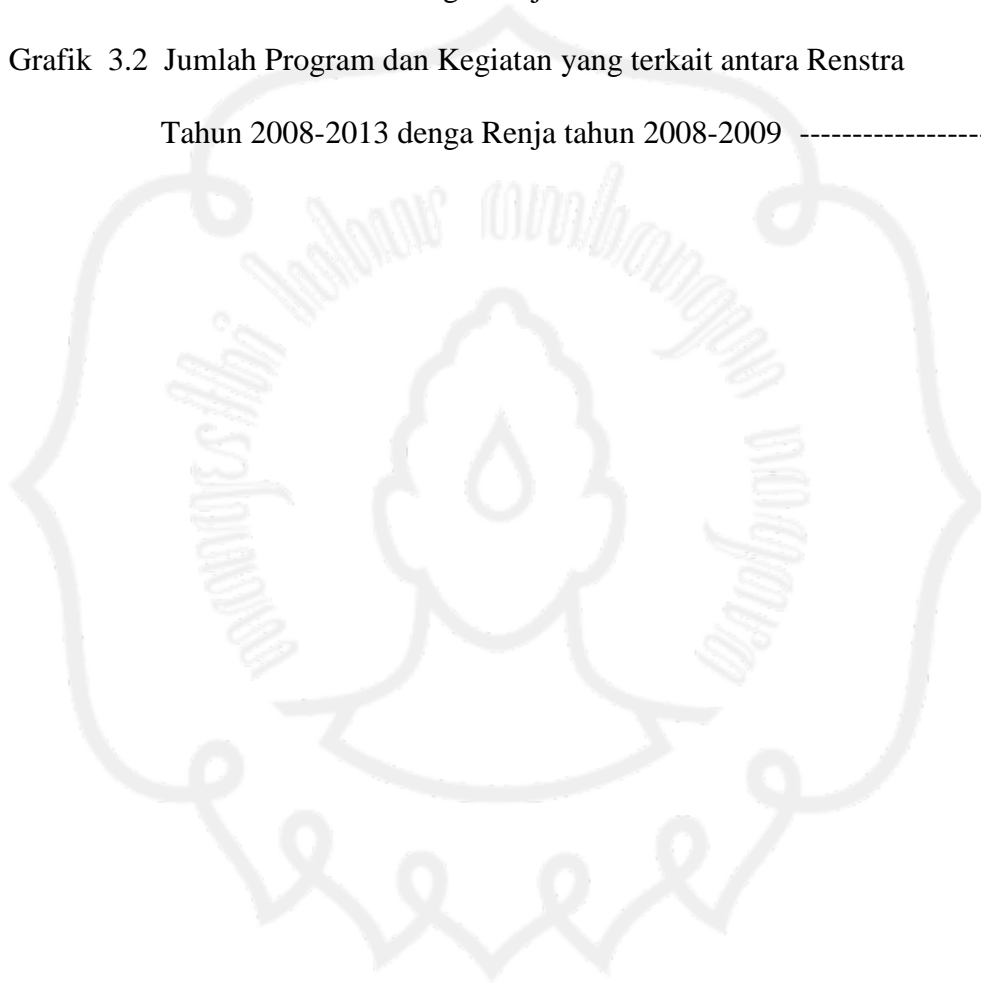
**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1.1 Alur Perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah.....	30
Gambar 1.3 Penyusunan dan penetapan RPJM.....	31
Gambar 1.4 Bagan Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	39
Gambar 1.5 Proses Penyusunan Rancangan APBD.....	42
Gambar 1.6 Alur Perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah.....	43
Gambar 1.7 Skema Kerangka Pemikiran -----	47
Gambar 1.8 Model Analisis Interaktif -----	57
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinperindakop Kabupaten Banyumas -----	72



**DAFTAR GRAFIK**

	Halaman
Grafik 3.1 Jumlah Program dan Kegiatan yang terkait antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja tahun 2008-2009 -----	101
Grafik 3.2 Jumlah Program dan Kegiatan yang terkait antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja tahun 2008-2009 -----	124



## ABSTRAK

**EKA MISRINA, D0105012, “Analisis Perbandingan Antara Rencana Strategis Tahun 2008-2013 Dengan Rencana Kerja Tahun 2008 Dan 2009 Di Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Banyumas” Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, 142 halaman.**

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2008 tentang RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 menjelaskan bahwa keberadaan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2008-2013 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan pemerintah yang akan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersifat indikatif yang nantinya akan dijabarkan menjadi Renja Satuan Perangkat daerah (Renja SKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. Jumlah keseluruhan Program dan kegiatan pada Renstra Tahun 2008-2013 yaitu berjumlah 75 program dengan 615 kegiatan, target jumlah Program dan kegiatan tersebut dijabarkan setiap tahun yaitu 15 program dengan 123 kegiatan. Renja Tahun 2008 dan 2009 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berjumlah 12 Program dengan 57 (Renja Tahun 2008) dan 44 kegiatan (Renja Tahun 2009). Berdasarkan hal tersebut, maka menarik perhatian peneliti untuk mengadakan penelitian mengenai analisis keterkaitan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 Di Dinperindakop Kabupaten Banyumas

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis Perbandingan Antara Rencana Strategis Tahun 2008-2013 dengan Rencana kerja Tahun 2008 dan 2009 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas berdasarkan jumlah program dan kegiatan.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif . Sumber data diperoleh dari data primer yaitu melalui wawancara dan observasi dan data sekunder yaitu melalui dokumentasi, catatan-catatan dan arsip. Data yang diperoleh kemudian diuji validitasnya dengan menggunakan teknik triangulasi data. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan menggunakan penyajian tabel dan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa dilihat pada segi program terdapat keterkaitan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009. Sedangkan bila dilihat pada segi kegiatan tidak terdapat keterkaitan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 karena jumlah kegiatan yang terkait antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 kurang dari 50%, hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran (APBD) yang diberikan oleh pemerintah daerah.

## ABSTRACT

**EKA MISRINA, D0105012, Comparative Analysis between Strategic Planning of 2008-2013 with Work Plan 2008 and 2009 Department of Industry Commercial and Cooperation in Banyumas Regency, A Thesis, Public Administration Department Faculty of Political and Social Science, Sebelas Maret University, Surakarta, 2010, 142 pages.**

The regulation of Banyumas Regent Number 103 Year 2008 about Local Middle Term Developmental Planning or RPJMD Banyumas Regency in 2008-2013 explained that RPJMD of Banyumas Regency in 2008-2013 is a part of a unit works management in government domain as the guidance for Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) which indicatively will be developed to be works planning of Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) as the annually planning documents. Total number of programs and activities in strategic planning 2008-2013 about 75 programs with 615 activities, the target of program number and those activities is described every year is 15 programs with 123 activities, but total programs and activities in work plan 2008 and 2009 can be implemented for 12 programs with 57 activities work plan 2008 and 44 activities work plan 2009. Based on that reason the writer interested to do a research about the relevance between strategic planning 2008-2013 with work plan 2008 and 2009 Department of Industry Commercial and Cooperation Banyumas Regency.

The aim of this research is to comparative analysis between strategic planning 2008-2013 with work plan 2008 and 2009 Department of Industry Commercial and Cooperation of Banyumas Regency based on total programs and activities.

The kind uses of research contained are descriptive qualitative. Data are taken from primary data through interview and observation meanwhile secondary data are taken from documents, notes and files. Data will be validate by triangulasi data. Then data will be analyse by applying table serving and interactive analysis model which cover data reduction, data presentation, and drawing conclusion.

From the result of the research can be conclude that there is relevance in program between strategic planning 2008-2013 with work plan 2008 and 2009. meanwhile there is no relevance between activities of strategic planning 2008-2013 with work plan 2008 and 2009. It is caused by the relevance of total activities between strategic planning 2008-2013 with work plan 2008 and 2009 under 50%, caused by less of local governmental budget.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Sehingga, pembangunan harus dilaksanakan secara merata di tanah air dan tidak hanya diberlakukan untuk beberapa golongan tertentu atau sebagian masyarakat tertentu saja. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Upaya dalam meningkatkan pembangunan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat yaitu dengan memberikan berbagai pelayanan seperti: pelayanan kesehatan, pendidikan, perekonomian, pendapatan dan lain sebagainya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan dibutuhkan manusia yang berkualitas, sumber dana yang memadai dan kekayaan atau potensi alam yang mendukung.

Salah satu cara mewujudkan pembangunan adalah melalui peningkatan di sektor perekonomian. Sektor Perekonomian ini dapat diwujudkan melalui salah satunya adalah peningkatan di bidang industri dan perdagangan sebagai penggerak utama proses industrialisasi sekaligus ujung tombak menghadapi globalisasi. Selain itu diperlukan pembangunan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

serta bercirikan persaingan sehat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan nilai tambah, pengembangan kewirausahaan, penyerapan tenaga kerja serta mengembangkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Sektor Perekonomian ini dapat digerakkan melalui bidang perdagangan dan perindustrian. Perdagangan dan perindustrian di Indonesia ini dilaksanakan oleh setiap daerah. Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004, seperti diketahui Indonesia sedang menjalani masa-masa awal pemerintahan yang bercorak desentralistik, dalam hal ini lebih sering dikenal dan disebut sebagai era otonomi daerah. Pada era ini dituntut adanya kemandirian dari daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber daya yang dimiliki demi kemajuan daerah.

Otonomi daerah berarti telah memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, Kewenangan membuat kebijakan Peraturan Daerah sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan lebih cepat dan lebih berkualitas. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber daya manusia yang dimiliki daerah, serta kemampuan daerah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada di daerah otonom. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa berakibat kontra produktif karena

yang terjadi bukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat, akan tetapi justru mendorong para pengusaha memindahkan lokasi usahanya ke daerah lain yang lebih mempunyai prospek yang baik.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bentuk perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah yang harus dilakukan dalam pengembangan potensi sumber daya yang tersedia. Salah satunya adalah dalam bidang perindustrian dan perdagangan. Bila dilihat dari bidang industri di kabupaten Banyumas ini paling banyak yang berkembang adalah industri rumah tangga, bukan hanya itu pula adapun industri-industri lain yang berkembang di Kabupaten Banyumas baik itu industri sedang maupun industri besar. Bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi yang mengatur dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Dinperindakop) Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 28 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Banyumas mengakibatkan adanya perubahan nomenklatur, yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas bergabung dengan Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Banyumas pada bulan Juli 2008 menjadi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas.

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas harus memiliki strategi dan perencanaan yang baik dalam rangka turut berupaya mewujudkan perekonomian yang lebih adil dan

merata berdaya saing dengan basis efisiensi, berbasis sumber daya alam dan berkeunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global.

Rencana Strategis atau Renstra ini disusun dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada di bidang pembangunan industri, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah. Renstra ini diperlukan dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyumas bidang industri, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah. Renstra memuat kebijakan pembangunan strategis secara rinci dan terukur guna mewujudkan visi pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun yang akan datang. Peranan perencanaan strategis dalam tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang organisasi sangatlah penting, oleh karena itu perencanaan strategis harus memuat batasan-batasan visi, misi dan tujuan organisasi yang jelas supaya jelas pula arah organisasi akan melangkah mencapai tujuan akhir organisasi.

Hasil analisis dari Lembaga Penelitian dan Pengkajian Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto menunjukkan bahwa Laju pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) ditunjukkan dengan laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyumas atas harga konstan tahun 2003 diketahui bahwa struktur ekonomi Kabupaten Banyumas selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2005 – 2010 relatif tidak mengalami banyak perubahan. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan cukup besar dalam perekonomian dari tahun ke tahun adalah

bidang pertanian (21,67 %), industri (16,95 %) dan jasa (15,91 %). Meskipun peranan bidang pertanian dan industri cenderung menurun dari tahun ke tahun, namun perlu adanya penanganan dan kebijakan pada kedua sektor ini karena merupakan sektor yang memberikan kontribusi dominan yang mampu menggerakkan aktivitas perekonomian di Kabupaten Banyumas. (Sumber Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas )

Jumlah perusahaan industri di Kabupaten Banyumas pada tahun 2008 sebanyak 41.170 unit dengan rincian Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK) mempunyai jumlah unit yang terbesar yaitu 36.393 unit, Industri Aneka (IA) sebesar 2.269 unit dan Industri Logam, Mesin dan Elektronika (ILME) sebesar 2.481 unit. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri tersebut sebanyak 90.581 orang. Permasalahan pada bidang industri antara lain : keterbatasan IKM terhadap akses pasar dan permodalan, lemahnya daya saing produk IKM di pasar, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan IKM, kurangnya kerjasama antara pengusaha kecil, menengah dengan pengusaha besar dan belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan industri. (Sumber Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas )

Bidang perdagangan mampu memberikan kontribusi sebesar 14,91 % bagi PDRB Kabupaten Banyumas pada tahun 2006. Bidang perdagangan terdiri dari perusahaan dagang besar, menengah dan kecil.



Perusahaan dagang kecil merupakan perusahaan dengan jumlah paling banyak yaitu 94 % dari total perusahaan dagang yang ada. Namun pemerintah perlu melakukan upaya-upaya agar perusahaan dagang kecil dapat bertahan dan menopang perekonomian rakyat. Potensi di bidang perdagangan adalah Purwokerto Trade Center Pasar Sokaraja, Pasar Hewan, Mix use Building/Plaza, Supplier Kebutuhan bahan baku sentra logam pasir. (Sumber Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas).

Sektor industri kecil di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu lima tahun terakhir, masih merupakan industri terbanyak atau andalan. Sektor Industri di Kabupaten Banyumas walaupun dengan persentase yang kecil tetapi terus mengalami perkembangan. Dari ketiga jenis industri yang ada (kecil, menengah, besar), industri kecil mempunyai perkembangan yang paling pesat baik dari sisi jumlah unit usahanya, penyerapan tenaga kerja maupun nilai produksinya.

**Tabel I.1**  
**Jumlah Perusahaan Skala Besar, Menengah dan Kecil Tahun 2008**

No	JENIS USAHA	JUMLAH
1	Jumlah Perusahaan Skala Besar	80 UU
2	Jumlah Perusahaan Skala Sedang	838 UU
3	Jumlah Perusahaan Skala Kecil	
	a. Industri Kecil Formal	1.890 UU
	b. Industri Kecil Informal	35.420 UU
	c. Dagang Barang/Jasa Formal	2.305 UU
	d. Dagang Barang/Jasa Informal	10.804 UU

(Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas)

Koperasi dan UMKM mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena selain berperan dalam

pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan Koperasi dan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar, baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan UMKM adalah rendahnya kualitas lembaga dan usaha, struktur permodalan, daya inovasi, etos kerja, akses teknologi informasi, peluang pasar, lemahnya jaringan usaha yang pada akhirnya mengurangi daya saing baik di pasar lokal maupun internasional.

Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya koperasi dan UKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan koperasi dan UKM, disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Melihat kenyataan dengan banyaknya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Banyumas sangat mendukung Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam mengembangkan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi dengan tujuan untuk memajukan daerah dan membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha yang akan ditekuni. Dalam melaksanakan tugas itu maka dinas perindustrian perdagangan dan koperasi Kabupaten Banyumas menetapkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam bentuk perencanaan strategis

Dinas perindustrian perdagangan dan koperasi Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2013.

Perencanaan strategis yang dilaksanakn kurun waktu 5 tahun ini dibuat untuk mempertegas kembali visi yang telah dibuat oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas yaitu “Terwujudnya Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang maju dan berdaya saing di Kabupaten Banyumas”. Dengan adanya visi ini maka perencanaan strategis sangat diperlukan sebagai dasar penilaian kinerja dan menjadi tolak ukur kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sektor industri, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah selama kurun waktu 2008-2013.

Renstra yang telah dibuat selama kurun waktu 5 tahun ini dijabarkan setiap tahunnya, tugas yang dilakukan setiap tahunnya adalah dengan menjabarkan rencana strategis 2008-2013 dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA). Peraturan Daerah Nomor :11 Tahun 2008 tanggal 28 Juni 2008 tentang organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas serta Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 43 Tahun 2008 tentang penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas perindustrian perdagangan dan koperasi kabupaten Banyumas, rencana kerja Tahun 2008 dan 2009, ini berdasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Banyumas tahun 2008-2013.

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 menjelaskan bahwa keberadaan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2008-2013 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan pemerintah yang akan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penyusunan Rencana Strategis SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersifat indikatif yang nantinya akan dijabarkan menjadi Rencana Kerja Satuan Perangkat daerah (Renja SKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan bagi SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Renstra dan Renja berisikan mengenai Penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2008-2009 oleh Dinas perindustrian perdagangan dan koperasi Kabupaten Banyumas berdasarkan pada isu-isu strategis yang perlu mendapatkan penanganan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi guna mempercepat pemulihan ekonomi, memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan mengatasi dampak globalisasi ekonomi.

Program dan kegiatan yang dilakukan dalam Renstra dan Renja membutuhkan dana yang berasal dari APBD Kabupaten banyumas, adapun dana yang dibutuhkan oleh Dinperindakop yaitu sebagai berikut :

**Tabel I.2**  
**Sosialisasi *Input* (Dana) APBD Kabupaten Banyumas**

RENJA	<i>Input</i> (Dana)	
	RENSTRA DINPERINDAKOP	APBD
RENJA 2008	Rp 7.945.675.000	Rp 5.806.006.500
RENJA 2009	Rp 8.807.687.900	Rp 6.184.500.000

*Sumber: (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas, Sub bidang keuangan)*

Dari data yang ada diatas pada renstra dinperindakop anggaran yang diperlukan untuk kegiatan dan program pada Renja 2008 adalah sebesar Rp 7.945.675.000 dan Renja 2009 dana yang dibutuhkan Rp 8.807.687.900. Renstra yang telah dibuat dalam kurun waktu 5 tahun diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas untuk memperoleh dana dalam melaksanakan kegiatan dan program (Renja), setelah disosialisasikan dengan berbagai pertimbangan, dana yang dikeluarkan pada APBD untuk mendanai kegiatan dan program dalam Renja berkurang yaitu pada Renja 2008 sebesar Rp 5.806.006.500 dan Renja 2009 yaitu Rp 6.184.500.000. Dana APBD yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mengalami penurunan sehingga berakibat adanya program dan kegiatan pada Renja tahun 2008 dan 2009 tidak dilaksanakan oleh Dinperindakop Kabupaten Banyumas, hal ini disebabkan karena penganggaran dana yang besar pada Renstra yang berisikan program dan kegiatan merupakan dana perkiraan yang akan dibutuhkan pada Renja Tahun 2008 dan 2009.

Dari adanya data yang ada diatas maka Jumlah Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.:

**Tabel I.3**  
**Perbandingan Jumlah program dan kegiatan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas**

Perbandingan	Jumlah	
	Program	Kegiatan
Rencana Strategis Tahun 2008-2013	75	615
Rencana Kerja Tahun 2008	12	57
Rencana Kerja Tahun 2009	12	44

*Sumber: Diolah dari formulir Rencana Strategis Tahun 2008-2013 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas dan RENJA 2008 dan 2009 Bidang SUB BINA PROGRAM*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Perbandingan Jumlah program dan kegiatan Renstra Dinperindakop Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 yaitu pada Renstra Tahun 2008-2013 program yang akan dilaksanakan berjumlah 75 program, itu merupakan jumlah keseluruhan program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun atau disebut dengan Renstra. Renstra ini kemudian dijabarkan dalam Renja atau rencana kerja yang akan dilaksanakan setiap tahun. Kurun waktu 5 tahun tersebut target program yang akan dilaksanakan setiap tahunnya yaitu berjumlah 15 program, tetapi pada Renja Tahun 2008 dan 2009 program yang dilaksanakan masing-masing berjumlah 12 program. Sedangkan pada kegiatan keseluruhan jumlah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 tahun berjumlah 615 kegiatan. Jumlah keseluruhan kegiatan yang terdapat pada renstra tersebut dijabarkan ke dalam Renja

yang dilaksanakan setiap tahunnya yaitu berjumlah 123 kegiatan, tetapi pada Renja Tahun 2008 berjumlah 57 kegiatan dan pada Renja Tahun 2009 berjumlah 44 kegiatan yang dilakukan. Program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Renstra Tahun 2008-2013.

Tabel diatas menunjukkan bahwa Renstra yang dijabarkan kedalam Renja belum terlaksana, padahal Renstra yang dibuat dalam kurun waktu 5 tahun ini diperlukan sebagai dasar penilaian kinerja yang menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya Renstra tersebut dijabarkan ke dalam Renja setiap tahunnya di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka menarik perhatian peneliti untuk mengadakan penelitian mengenai analisis perbandingan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas.

## **I.2 PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana perbandingan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 dan mengapa terdapat ketidakterlaksanaan Program dan Kegiatan Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas ?

### **I.3 TUJUAN PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu kegiatan berupa penelitian, tentunya peneliti mempunyai tujuan tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perbandingan Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas berdasarkan jumlah program dan kegiatan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas.

### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Dengan mengetahui Jumlah Program dan kegiatan dalam menganalisis keterkaitan Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, maka penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

1. Sebagai masukan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas agar Program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Renja Tahun 2008 dan 2009 dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.
2. Sebagai bahan informasi bagi pembaca maupun pihak-pihak terkait yang mungkin ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam di masa yang akan datang.



## **I.5 Tinjauan Pustaka**

Salah satu unsur penting dalam penelitian adalah tinjauan pustaka yang berisikan mengenai teori-teori yang digunakan oleh peneliti. Karlinger mendefinisikan teori sebagai rangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Menurut definisi ini teori ini mengandung tiga hal yaitu serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan, teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena social dengan cara menentukan hubungan antar konsep dan menerangkan fenomena tertentu dengan menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya (Singarimbun dan Effendi, 1995:37).

Sehubungan dengan penjelasan di atas maka teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua faktor atau lebih atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta-fakta di sini merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Mengingat pentingnya tinjauan pustaka yang berisikan mengenai teori-teori yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian, maka dalam bagian ini akan diuraikan teori-teori yang dianggap dapat digunakan sebagai pedoman. Uraian hal tersebut secara terperinci akan dijelaskan dibawah ini :

### **I.5.1 Rencana Strategis**

Setiap manusia mempunyai rencana yang berbeda-beda dalam menjalankan kehidupan, bukan hanya itu setiap organisasi juga

memiliki rencana yang matang untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Rencana adalah cara spesifik yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran kegiatan. Manfaat rencana ini agar tujuan dari kegiatan yang di lakukan dapat tercapai dengan yang diharapkan, yang mempunyai kriteria spesifik, dapat di capai, relevan dengan masalah yang ingin di atasi dan mempunyai jangka waktu dalam pelaksanaannya.

Konsep perencanaan menurut Koontz dan O'Donnel (dalam Purwanto,2007:45) yaitu :

*“planning is the function of a manager which involves the selection from alternatives of objectives, policies, procedures and programs.* Terjemahannya kurang lebih yaitu Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, program-program dari alternatif-alternatif yang ada”.

Syarat-syarat rencana yang baik menurut (Purwanto, 2007:49) antara lain :

1. Merumuskan dahulu masalah yang akan direncanakan.
2. Perencanaan harus didasarkan pada informasi, data dan fakta.
3. Menetapkan beberapa alternative dan premisnya.
4. Putuskanlah suatu keputusan yang menjadi rencana rasional, mudah dipahami, dapat dikerjakan, fleksibel, berkesinambungan dalam urutan dan waktu pencapaiannya.

Rencana yang baik memerlukan beberapa langkah-langkah yang dikemukakan oleh (Purwanto, 2007:49-50) adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan serta merumuskan dahulu masalah/usaha/tujuan yang akan direncanakan itu.
2. Mengumpulkan data,informasi dan fakta yang diperlukan secukupnya.

3. Menganalisis dan mengklarifikasi informasi, serta hubungan-hubungannya.
4. Menetapkan perencanaan, premis-premis dan hambatan-hambatan serta hal-hal yang mendorongnya.
5. Menentukan beberapa alternative.
6. Pemilihan keputusan yang terbaik dari alternative-alternatif yang ada.
7. Tetapkanlah urutan-urutan dan penetapan waktu secara terperinci bagi rencana yang diusulkan.
8. Laksanakan pengecekan tentang kemajuan rencana yang diusulkan.

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dijelaskan bahwa "perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.". Pengertian perencanaan juga terdapat dalam PP No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, pengertian perencanaan sama dengan yang terdapat pada UU No.25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Istilah *strategy* berasal dari kata Yunani *strategos*, atau *strategos* dengan kata jamak strategi. *Strategos* berarti jenderal tetapi dalam Yunani Kuno sering berarti perwira Negara (*state officer*) dengan fungsi yang luas. Pada abad ke-5 SM sudah dikenal adanya *Board of ten strategy* di Athena, mewakili 10 suku di Yunani (Salusu,1998:85). Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (dalam Akdon 2007:130) mengartikan Strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak

dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka penapaian tujuan organisasi tersebut.

Sedangkan menurut (Salusu, 1998: 101) Strategis adalah suatu seni menggunakan kecakapa dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Pemimpin memfokuskan organisasi mereka pada arah strategis. Mereka menciptakan agenda mereka untuk perubahan startegis. Pemimpin organisasi menjaga kemajuan organisasi menuju visi strategis. Pemimpin-pemimpin strategis dalam sektor publik modern memberdayakan para manajer dan karyawan mereka untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik ( Gaspersz, 2004: vii).

Strategis yang digunakan dalam suatu organisasi diungkapkan oleh Shirley dalam (Salusu, 1998: 99-100) pada umumnya membahas mengenai :

1. Tujuan dan sasaran yang digunakan.
2. Lingkungan
3. Kemampuan internal
4. Kompetisi
5. Pembuat strategi
6. Komunikasi

Tipe-tipe strategis yang digunakan dalam suatu organisasi menurut (Salusu, 1998:105) yaitu :

1. *Corporate Strategy* (Strategi organisasi).
2. *Program Strategy* (Strategi program).
3. *Resource Support Strategy* ( strategipendukung sumber daya).

#### 4. *Intitutional Strategy* ( Strategi kelembagaan).

Prinsip-prinsip untuk menyukkseskan strategis diungkapkan oleh Hatten dan Hatten (dalam Salusu,1998:108-109) suatu organisasi yang dibuat harus memiliki petunjuk bagaimana organisasi itu bisa sukses yaitu melalui :

1. Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya.
2. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategii.
3. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain.
4. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya. Sumber daya adalah suatu yang kritis.
5. Strategi hendaknya memperhitungkan risiko yang tidak terlalu besar.
6. Strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah dicapai.
7. Tanda-tanda dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait, dan terutama dari para eksekutif, dari semua pimpinan unit kerja dalam organisasi.

Maka dalam strategi diperlukan suatu pemimpin yang di Bantu oleh para pegawainya dalam membuat keputusan untuk suatu strategis yang akan dilakukan. Strategis ini dapat merespon terhadap harapan-harapan masyarakat yang akan menelaah terhadap suatu situasi yang akan langsung berhubungan dengan kepentingan banyak orang atau masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan.

Istilah “Perencanaan Strategis” mulai digunakan pada tahun 1960-an dan menjadi paradigma *alternative* dalam bidang perencanaan, menggantikan model perencanaan lama. Perencanaan

strategis menjadi sangat penting manakala organisasi menghadapi perubahan-perubahan lingkungan yang tidak menentu karena gagalnya model perencanaan jangka panjang dalam memprediksi situasi yang cepat berubah dan tidak pasti. Keadaan tersebut menyadarkan organisasi untuk menerapkan suatu perencanaan yang fleksibel, mampu memprediksi lingkungan yang cepat berubah, serta dapat berjalan seiring dengan ketidakpastian keadaan. Konsep perencanaan strategis memfokuskan pada perencanaan bidang-bidang strategis dan tidak perlu melakukan semua hal sehingga perencanaan harus dilakukan dengan cermat, tepat dan matang.

Perencanaan / Rencana Strategik (RENSTRA / *strategic planning*), yang merupakan bagian pertama dari manajemen strategis, mencakup penetapan tujuan, sasaran dan strategi organisasi. Strategi organisasai berisi tentang kebijakan, program dan kegiatan organisasi, (muljadi,2006:7).

Menurut pendapat Salusu, 1998: 500 Perencanaan strategis adalah suatu cara untuk mengurangi risiko, suatu instrumen untuk mendidik para manajer, para pejabat inti, pejabat menengah, dan kepala-kepala unit kerja selain itu pula adalah suatu proses dalam membuat keputusan strategic atau menawarkan metode untuk memformulasikan dan mengimplementasikan keputusan strategis, serta mengalokasikan sumber daya untuk mendukungnya semua unit kerja dan tingkatan dalam organisasi. Perencanaan strategis juga dapat

diartikan sebagai suatu metode dalam mengarahkan para pemimpin unit kerja sehingga keputusan-keputusan dan tindakan mereka mempunyai dampak terhadap masa depan organisasi dengan cara yang konsisten dan rasional.

Perencanaan strategis bagi pemerintah daerah dapat dipandang sebagai suatu yang dapat digunakan oleh para pemimpin pemerintahan untuk membayangkan, memvisualisasikan masa depan organisasi pemerintahannya, kemudian mengembangkan struktur, staf, produser, operasionalisasi, serta pengendalian sehingga secara gemilang mampu mencapai masa depan yang diinginkan itu. (Salusu, 1998: 501).

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh John C. Camillus, sebagai berikut:

*Strategic planning systems differ in the extent to which they emphasize creativity as opposed to control, it has been stressed that these two somewhat opposed orientations need to be balanced in order to enhance the effectiveness of a system. (International Journal of Strategic Planning a Discriminant Analysis Approach, 349).*

Terjemahannya kurang lebih, Sistem Perencanaan Strategi berbeda tingkat dimana mereka menitikberatkan pengawasan kreatifitas sebagai Lawan, itu mempunyai penekanan bahwa apa kebalikan dua dari beberapa lawan orientasi-orientasi ini memerlukan untuk jadi seimbang dalam menambahkan keefektifan dari sebuah sistem.

Perencanaan strategis dalam setiap organisasi harus bersifat responsif terhadap segala bentuk perubahan lingkungan organisasi yang terjadi. Apabila perencanaan strategis itu kurang responif, maka

organisasi yang bersangkutan akan kesulitan menentukan visi dan misi bahkan tujuan organisasi sekalipun. Perencanaan strategis merupakan suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai pada implementasi paling depan sampai pada tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan (Muljadi, 2006:2).

Menurut beberapa penulis (Steiner, 1979; Barry, 1986; Freeman, dan Roering, 1986; Bryson, Van de Ven, dan roaring, 1987) bahwa rencana strategis dapat membantu suatu organisasi :

1. Berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi yang efektif.
2. Memperjelas arah masa depan.
3. Menciptakan prioritas
4. Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan.
5. Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan.
6. Menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidang-bidang yang berada di bawah kontrol organisasi.
7. Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi.
8. Memecahkan masalah organisasi.
9. Memperbaiki kinerja organisasi.
10. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif.
11. Membangun kerja kelompok dan keahlian.

Namun mereka menegaskan bahwa meskipun rencana strategis dapat memberikan seluruh manfaat di atas, tidak ada jaminan semuanya akan tersedia. Karena satu hal, perencanaan strategis hanyalah kumpulan konsep, prosedur dan alat. Jadi perencana perlu bersikap sangat hati-hati karena tidak semua pendekatan memiliki kegunaan yang sama, dan beberapa persyaratan tertentu dapat mempengaruhi keberhasilan penggunaan masing-masing pendekatan.



Konsep kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Barry (dalam Salusu, 1998:509) perencanaan strategis baik organisasi besar maupun kecil, jauh melampaui organisasi lain yang tidak menggunakan perencanaan strategis. Hal ini antara lain karena perencanaan itu didasarkan atas misi dan visi strategis yang jelas. Misi dan visi strategis itu sendiri mampu mengendalikan arah perencanaan yang baik.

Dalam hal organisasi kekurangan dana karena menurunnya bantuan dari luar, perencanaan strategis dapat mencari jalan keluar, misalnya mengurangi biaya, mencari sumber lain, dan melakukan penggabungan. Menurut (Salusu, 1998:510) untuk bisa mencari jalan keluar, tim perencanaan perlu diperkuat, atau kalau belum ada, hendaknya dibentuk dengan anggota yang terdiri dari pejabat-pejabat kunci dan beberapa staff lain yang dipandang perlu. Anggota-anggota tim atau badan perencanaan itu makin lama memperoleh pengetahuan yang bermanfaat dalam menaggulangi masalah-masalah yang sering tidak diantisipasi.

Perencanaan strategis tidak selalu dapat memberi nasihat ini disampaikan oleh (Bryson, 2008:13), karena adanya dua alasan yang memaksa bertahan pada upaya perencanaan strategis yaitu :

1. Perencanaan strategis tidak hanya menjadi langkah pertama yang terbaik bagi organisasi rumpun atapnya.

2. Perencanaan startegis akan menjadi kegiatan yang buang-buang waktu saja jika organisasi tidak memiliki ketrampilan, sumber daya atau komitmen para pembuat keputusan guna menghasilkan rencana yang baik.

Agar mencapai hasil-hasil yang diharapkan, manajemen dan karyawan harus memiliki komitmen terhadap perencanaan strategis dan memberikan perhatian penuh pada implementasi dari sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan pernyataan ini dikemukakan menurut (Gaspersz, 2004:2-4), Beliau juga mengemukakan mengenai manfaat perencanaan strategis antara lain :

1. Berguna bagi perencanaan untuk perubahan dalam lingkungan dinamik yang kompleks.
2. Berguna untuk pengelolaan hasil-hasil (*Managing for result*).
3. Perencanaan strategis merupakan suatu alat manajerial yang penting.
4. Perencanaan strategis berorientasi masa depan.
5. Perencanaan strategis mampu beradaptasi (*adaptable*).
6. Perencanaan strategis adalah penting untuk mendukung pelanggan.
7. Perencanaan strategis mempromosikan komunikasi.

Kriteria lain mengenai keuntungan Perencanaan strategis disampaikan oleh Menurut (Rino.A.Nugroho, dalam Handout mengenai memulai perencanaan strategis, 2008:2-4) yaitu sebagai berikut:

1. Persebaran pemikiran strategis melalui tindakan.
2. Mengubah Pengambilan kebijakan
3. Meningkatkan responsivitas kinerja organisasi

Sedangkan menurut Robbins dan Coulter (1999:200), ada empat alasan dan manfaat perlunya perencanaan strategis yaitu :

1. Perencanaan strategis memberi arah.
2. Perencanaan strategis mengurangi dampak perubahan.
3. Perencanaan strategis memperkecil pemborosan.
4. Perencanaan strategis menentukan standar pengendalian.

Jika perencanaan strategis dilakukan dalam situasi apapun di dalam organisasi harus merupayakan keputusan yang terfokus dan terbatas sesuai dengan keadaan yang bertujuan mengembangkan ketrampilan, sumber daya dan komitmen yang diperlukan.

Rencana strategis (Renstra) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinperindakop Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 berfungsi sebagai dokumen publik yang diharapkan dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah sektor industri, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Proses penyusunan dilakukan melalui musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap *stakeholders* di Kabupaten Banyumas.

Perencanaan strategis yang merupakan bagian pertama dari manajemen strategis mencakup penetapan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Strategi organisasi berisi kebijakan, program dan kegiatan organisasi. Semua hal tersebut merupakan kelanjutan dari tahap manajemen strategis sebelumnya, sebelum penetapan tujuan organisasi, yaitu penetapan urutan asumsi strategis pilihan atau faktor kunci keberhasilan (FKK). Kemudian setiap FKK dirinci lebih lanjut penjabarannya menjadi beberapa tujuan, dan tiap tujuan dijabarkan menjadi beberapa tahapan sasaran, dan kemudian tiap sasaran memiliki

beberapa strategi yang dituangkan rinciannya dalam beberapa kebijakan, beberapa program dan beberapa kegiatan organisasi (Muljadi, 2006:7). Setiap langkah dalam rencana strategis perlu dipikirkan bagaimana langkah-langkah tersebut dapat di aplikasikan ini dikemukakan oleh (Gaspersz, 2004:5) yang nantinya sangat berguna dalam melaksanakan misi organisasi yang telah ditetapkan. Perlu dipahami apabila suatu organisasi gagal membuat rencana, maka sebenarnya organisasi tersebut telah merencanakan suatu kegagalan. Oleh karena itu konsep perencanaan strategis harus diusahakan dengan sebaik-baiknya.

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Jane E. Dutton and Robert

B. Duncan, sebagai berikut:

*The Strategic planning process is defined as the set of human interactions, formal and informal that take place in the course of generating a strategic plan. For the purposes of the discussion below the focus will be on corporate level as opposed to business or functional level planning. Strategic planning process serves as a type of performance program absorbing uncertainty by reducing the information load facing decision makers. Through the planning process, information critical to the organizations survival is received and interpreted. Signals are received in the form of informational inputs, e.g. data on internal actions such as personnel changes, capital requirements, etc. or external actions such as competitor moves, regulatory changes. etc. formally or informally, this process produces the array of strategic issues that have been earmarked as significant for the organizations future. (International Journal of Strategic Planning Process on Strategic Change, 105-106).*

Terjemahannya kurang lebih, Proses perencanaan strategis ditentukan sebagai kumpulan dari interaksi-interaksi manusia formal dan informal itu terjadi dalam perjalanan dari penghasilan sebuah rencana strategis . untuk tujuan-tujuan dari focus diskusi di bawah

akan terjadi tingkat diatas kerja sama sebagai lawan untuk urusan-urusan atau tingkat perencanaan fungsional. Proses perencanaan strategis disajikan sebagai sebuah tipe dari penyerapan tampilan program tidak pasti oleh pengurangan beban informasi dihadapan pembuat keputusan., antara proses perencanaan informasi penting untuk ketahanan organisasi yang diterima dan diungkapkan. Tanda-tanda yang diterima dalam bentuk masukan-masukan yang bersifat informasi misalnya data dalam tindakan-tindakan internal seperti pergantian anggota, penerimaan capital, dll. Tindakan external seperti langkah-langkah pesaing, perubahan peraturan, dll. Secara formal atau informal proses ini menghasilkan pameran dari persoalan-persoalan strategis itu merupakan ciri yang signifikan untuk masa depan organisasi.

Perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana regulasi tersebut juga mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan pada UU tersebut dan amanat UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut dengan RPJMD. (Peraturan Bupati Banyumas No. 103 tahun 2008 tentang RPJMD Kabupaten banyumas Tahun 2008-2013).

Pada dokumen Rencana Strategis Dinperindakop menyatakan bahwa Rencana Strategis Dinperindakop Tahun 2008-2013 yaitu dokumen perencanaan Dinperindakop Kabupaten Banyumas periode tahun 2008-2013 yang berisi uraian secara rinci dan terukur mengenai berbagai kebijakan dan program pembangunan dan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bersama dengan instansi pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinperindakop Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 disusun berpedoman pada visi, misi dan program Pembangunan Kepala Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas dan berbagai kebijakan / regulasi lain yang secara langsung atau tidak langsung memiliki keterkaitan dengan penyusunan perencanaan pembangunan bidang industri, perdagangan, pasar, koperasi dan UKM di Kabupaten Banyumas. (Dokumen Renstra Dinperindakop Kabupaten Banyumas)

Maksud penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinperindakop Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2014 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinperindakop Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu

lima tahun (2008-2013). Tujuan adanya Renstra SKPD Dinperindakop

Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 disusun yaitu :

- a. Memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pemerintah (aparatur dinas Perindakop) tentang mekanisme, proses dan substansi perencanaan pembangunan dan pemberdayaan pada sektor industri, perdagangan, pasar, koperasi, dan UKM selama lima tahun dengan baik.
- b. Sebagai acuan dalam perencanaan kerja yang komprehensif periode 2008-2013, sehingga terwujud kejelasan tentang arah kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan Dinperindakop Kabupaten Banyumas selama tahun 2008-2013.
- c. Memberikan arahan kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang jelas, dengan harapan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara sinergis sehingga memberikan hasil yang optimal.
- d. Sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja Dinperindakop Kabupaten Banyumas selama lima tahun.
- e. Sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan *Stakeholders* pembangunan dan pemberdayaan pada sektor industri, perdagangan, pasar, koperasi, dan UKM terhadap program-program yang akan dilaksanakan pada kurun waktu lima tahun. (Dokumen Renstra Dinperindakop Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013)

Pada PP No.8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan daerah,

Rencana pembangunan daerah meliputi :

- a. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- b. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- c. RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Perencanaan dimulai dengan adanya informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional. Dalam memulai suatu rencana strategis diperlukan suatu perencanaan adapun ruang lingkup Perencanaan Daerah Menurut (Dadang Solihin, 2005:10) yaitu sebagai berikut disertai dengan penjelasan penetapan yang terdapat pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional :

1. Rencana Pembagunana Jangka Daerah (RPJP-Daerah)  
Ini terdapat pada penetapan Perda pasal 13 ayat 2 : RPJP Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah)  
Teradapat pada Peraturan KDH pasal 19 ayat 3 yaitu : RPJMD ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah kepala daerah dilantik. RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 ini digunakan sebagai dasar penilaian kinerja bupati dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi tolak ukur keberhasilan Bupati dalam laporan peratnggungjawaban kepada daerah terkait dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerahselama kurun waktu 2008-2013.
3. RENSTRA SKPD  
Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada 19 ayat 3. menurut PP no 8 tahun 2008 renstra SKPD ini memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
RKPD ditetapk oleh Peraturan Kepala Daerah KDH
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)  
Kepala satuan kerja perangkat daerah menyiapkan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 yaitu kepala bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM daerah. Dan berpedoman pada Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 4. ([www.dadangsolihin.com](http://www.dadangsolihin.com))

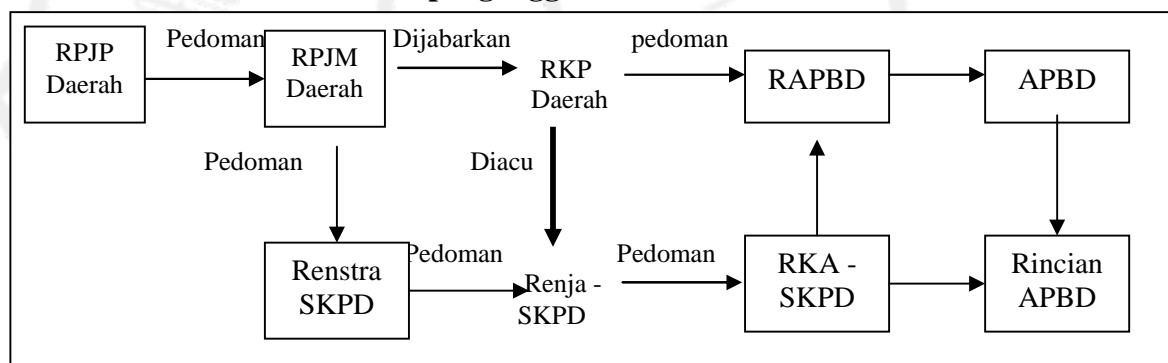


Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu :

1. Strategi Pembangunan Daerah
2. Kebijakan umum
3. Arah Kebijakan Keuangan daerah
4. Programm SKPD, lintas SKPD kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam :
  - kerangka regulasi
  - Kerangka anggaran. (Dadang Solihin, 2005:12)

Dibawah ini akan dijabarkan mengenai alur perencanaan dan penganggaran yang dikemukakan oleh (Dadang Solihin, 2005:16) yaitu sebagai berikut:

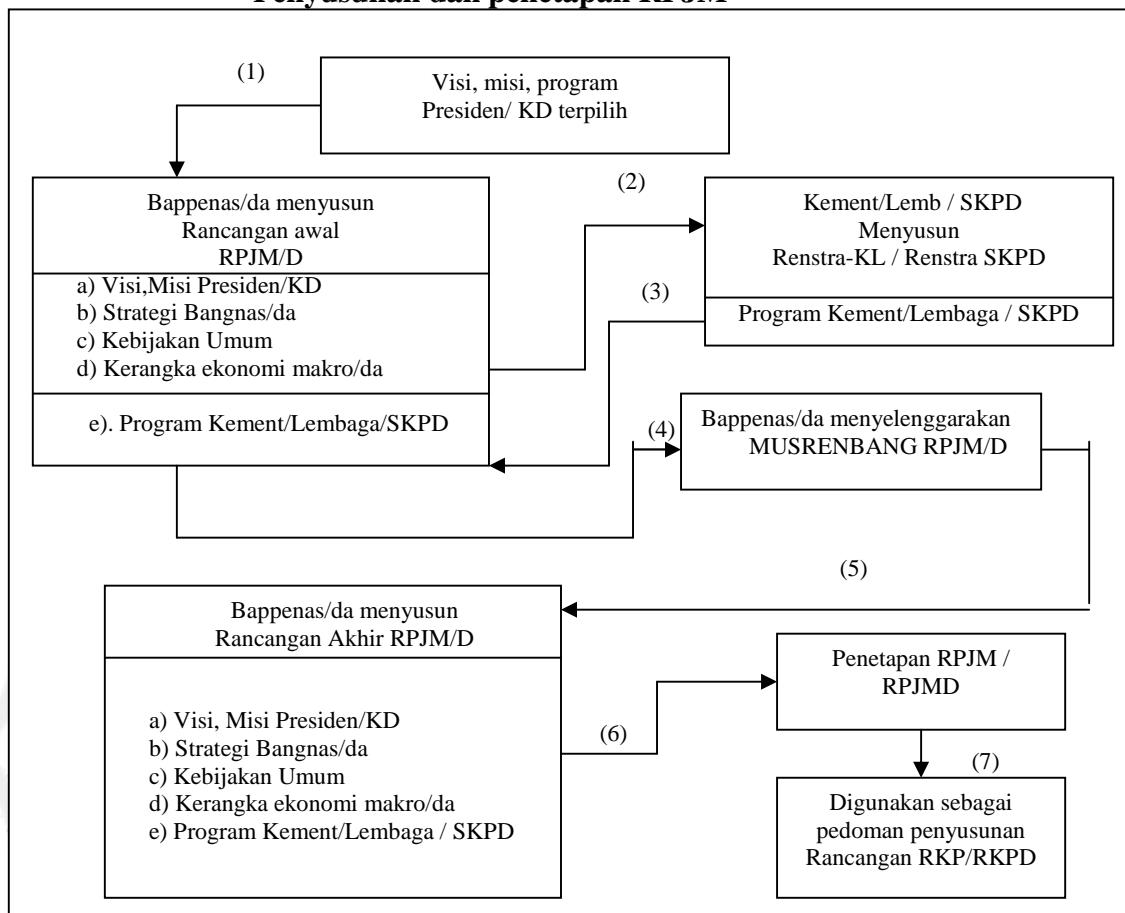
**Gambar I.2**  
**Alur Perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah**



Sumber : (Dadang Solihin, 2005:16).

Penyusunan dan penetapan RPJM dapat dilihat pada Gambar 1.3 dibawah ini :

**Gambar 1.3**  
**Penyusunan dan penetapan RPJM**



Sumber : (Dadang Solihin, 2005:20).

Jadi, rencana strategis merupakan satuan kerja yang dilakukan oleh suatu instansi atau dinas dan suatu perusahaan berisikan mengenai visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut dengan tujuan mengembangkan ketrampilan, sumber daya dan komitmen yang diperlukan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk melangkah mencapai tujuan akhir organisasi.

### 1.5.2 Rencana Kerja

Menurut UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja-SKPD yang merupakan penjabaran Renstra SKPD berisikan mengenai :

1. Kebijakan SKPD
2. Program dan kegiatan pembangunan
  - Dilaksanakan pemerintah
  - Mendorong partisipasi masyarakat

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. ([www.slideshare.net](http://www.slideshare.net))

Rencana kerja (Renja) Dinperindakop Kabupaten Banyumas disusun sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan daerah No.11 Tahun 2008 Tanggal 28 Juni Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas serta Peraturan Bupati Banyumas No. 43 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten

banyumas. Dengan Adanya Peraturan tersebut mengakibatkan adanya perubahan nomenklatur, yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas bergabung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas. agar tidak terjadi kevakuman dokumen perencanaan, maka dipandang perlu adanya penyusunan Rencana Kerja Dinperindakop Kabupaten Banyumas. (LAKIP Dinperindakop Kabupaten Banyumas Tahun 2008)

Rencana Kerja (Renja) Dinperindakop disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013. (Renja-SKPD Dinperindakop Tahun 2008-2009)

Renja yang dilakukan oleh Dinperindakop Kabupaten Banyumas merupakan tolak ukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008-2009. (Renja-SKPD Dinperindakop Tahun 2008-2009 )

Adapun maksud dilakukan penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinperindakop Kabupaten banyumas adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinperindakop Kabupaten Banyumas, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan Renja SKPD Dinperindakop ini disusun sebagai berikut :

1. Terwujudnya dokumen perencanaan kerja yang komprehensif sebagai penjabaran dari rencana strategis Dinperindakop Kabupaten Banyumas.

2. Terwujudnya dokumen perencanaan pembagunan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi untuk mewujudkan pembangunan daerah.
3. Terwujudnya pedoman bagi Dinperindakop Kabupaten Banyumas dan seluruh pihak terkait (*Stakeholders*) dalam pembagunan bidang perindustrian, perdagangan dan perkoperasian.
4. Terwujudnya kejelasan arah kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan Dinperindakop Kabupaten Banyumas.

Renja SKPD Dinperindakop Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2009 merupakan suatu dokumen perencanaan Dinperindakop Kabupaten Banyumas untuk periode tahun 2008-2009 yang berisi uraian secara rinci dan terukur mengenai berbagai kebijakan dan program pembangunan dalam melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bersama dengan instansi pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat. (Renja SKPD Dinperindakop Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2009)

### **1.5.3 Program**

Menurut UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program merupakan proses bagi penentuan jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan strategi suatu Renstra. Substansi program antara lain sebagai berikut :

- a. Merupakan rincian tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjabarkan setiap kebijakan organisasi.
- b. Memiliki masa jangka menengah dan jangka panjang antara 3 sampai 5 tahun, juga dapat bersifat tahunan mengenai waktu pelaksanaan.
- c. Melekat dan menjadi pedoman bagi setiap fungsi dari organisasi.

(Muljadi, 2006:170)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

Langkah langkah dalam Penyempurnaan Program Pembangunan antara lain :

- Koordinasi Program Pembangunan
- Lingkup pusat dan nasional, koordinasi oleh lembaga/badan perencanaan pembangunan nasional.
- Lingkup provinsi, koordinasi oleh lembaga/badan perencanaan pembangunan provinsi.
- Lingkup kabupaten/kota, koordinasi oleh lembaga/badan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- Pengendalian Program Pembangunan
- Pengendalian di tingkat nasional dan daerah, akan dilakukan secara koordinatif dengan melibatkan unsur-unsur

perencanaan, pengendalian, pembinaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pendataan dan informasi, dengan pendekatan instrumen kebijakan dan anggaran pembangunan di Pusat dan Daerah. (www.slideshare.net)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga atau masyarakat yang dikordinasikan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

#### **1.5.4 Kegiatan**

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh unit-unit kerja atau komponen organisasi dalam rangka merealisasikan program kerja operasionalnya sesuai Renstra bagi suatu organisasi. Kegiatan bersifat hal konkret, maka dalam merumuskan kegiatan harus SMART (*specific, measureable, aggressive, but attainable, Result oriented dan Time bound*), dan diasanya disebut dengan Lembaran Kerja (Formulir PK). (Muljadi, 2006: 171)

Menurut (Muljadi, 2006:49) rumusan kegiatan pada setiap program dirumuskan lebih dari satu atau minimal dua kegiatan. Kegiatan yang harus dilakukan setiap program, dengan memperhatikan:

- Kemampuan dana, yang dapat didukung oleh masyarakat, swasta, dan dana pemerintah (APBN/ APBD).
- Kecermatan pemanfaatan sumber dana yang harus dioptimalkan manfaatnya (dana bisa jadi swadaya, pinjaman dalam negeri)

- Efisiensi berdasar atas pemilihan alternatif
- Kecermatan pemanfaatan sumber daya yang lain dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal
- Pemakaian jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan
- Perhitungan faktor secara cermat.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana kegiatan terdiri dari pilihan-pilihan organisasi atau instansi pemerintah untuk melaksanakan metode, proses, ketrampilan,



peralatan dan sistem kerja dalam rangka mengimplementasikan program kerja yang telah dibuat dengan memperhatikan lingkungan yang ada dalam organisasi, baik lingkungan internal maupun eksternal. (Muljadi, 2006: 89)

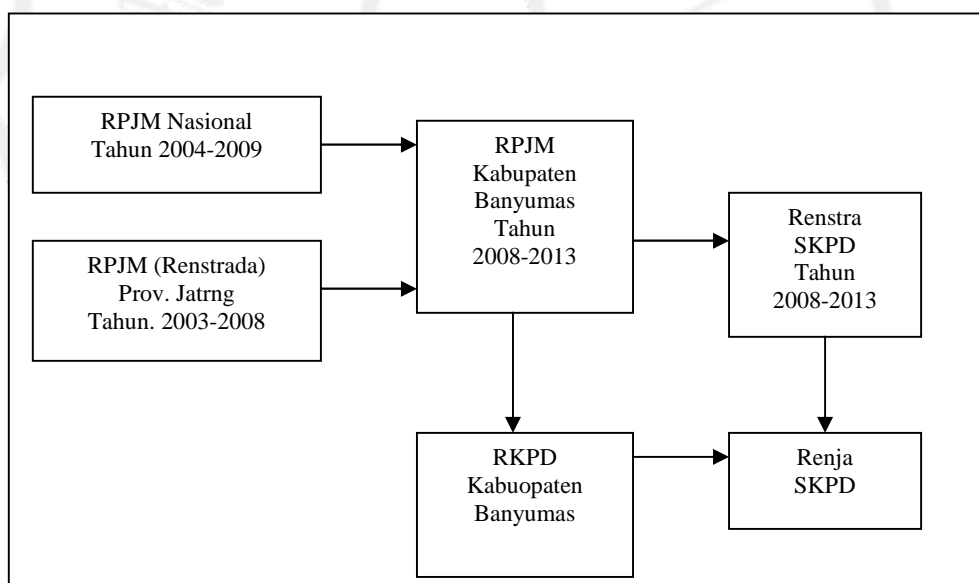
### **1.5.5 Analisis perbandingan antara Renstra dengan Renja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas No. 103 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 dijelaskan bahwa hubungan RPJM daerah dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu sebagaimana yang telah diamatkan dalam UU no. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu disusun RPJMD Kabupaten banyumas yang merupakan penjabran dari visi, misi, program kepala daerah terpilih. Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD atau Renstrada Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya RPJMD Kabupaten banyumas akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banyumas.

Keberadaan RPJMD Kabupaen Banyumas tahun 2008-2013 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan pemerintah yang akan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penyusunan Rencana Strategis SKPD yang

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersifat indikatif yang nantinya akan dijabarkan menjadi Rencana Kerja Satuan Perangkat daerah (Renja SKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan bagi SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Lebih jelasnya lihat pada gambar 1.4 bagan hubungan RPJMD dengan dokumen Perencanaan lainnya sebagai berikut :

**Gambar 1.4**  
**Bagan Hubungan Antara RPJM Nasional dengan Renstra SKP Daerah dan Renja SKP Daerah**



Sumber : (Dokumen Peraturan Bupati Banyumas No. 103 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013)

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas berbantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah seperti yang disebut diatas didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) menyebutkan bahwa, dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Penyusunan RAPBD berdasarkan anggaran berbasis kinerja (ABK) diperlukan sumber daya manusia yang mampu untuk melaksanakannya. Dalam usaha meningkatkan sumber daya manusia tersebut, BPKP berusaha berperan aktif membantu Pemerintah Daerah dengan menyusun Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja.

Untuk menyusun ABK, pemerintah daerah terlebih dahulu harus mempunyai Renstra. Renstra merupakan kegiatan dalam mencari tahu dimana organisasi berada saat ini, arahan kemana organisasi harus menuju, dan bagaimana cara (strategik) untuk mencapai tujuan itu. Oleh karenanya, renstra merupakan analisis dan pengambilan keputusan strategik tentang masa depan organisasi untuk menempatkan

dirinya (*positioning*) pada masa yang akan datang. Renstra memberikan petunjuk tentang mengerjakan sesuatu program/kegiatan yang benar (*doing the right things*). Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam perumusan renstra haruslah jelas dan nyata serta tidak berdwimakna sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk/arah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional.

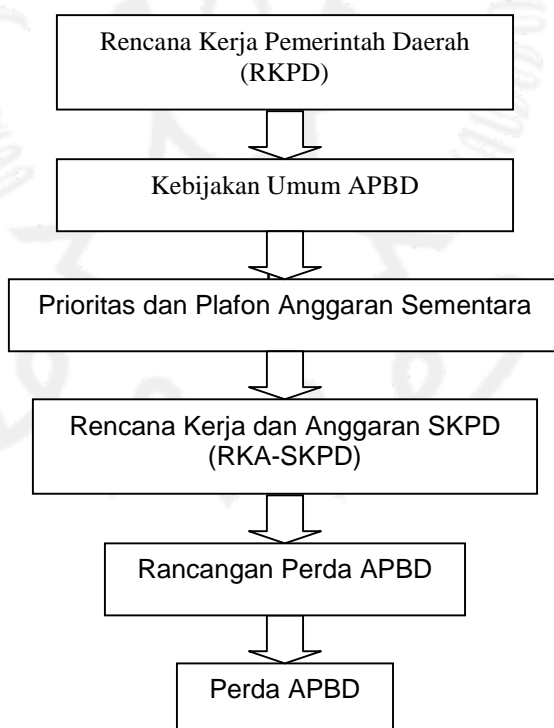
Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan yang mencakup penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 serta Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD paling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun berjalan. Kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD. Proses penyusunan RKPD tersebut dilakukan antara lain dengan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*) yang selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemuka adat, pemuka agama, dan kalangan dunia usaha.
- 2) DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- 3) Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.
- 4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.

- 5) RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
- 6) Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya.
- 7) Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
- 8) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. (www.slideshare.net)

Tahapan penganggaran di atas dapat diringkas dengan bagan seperti di bawah ini :

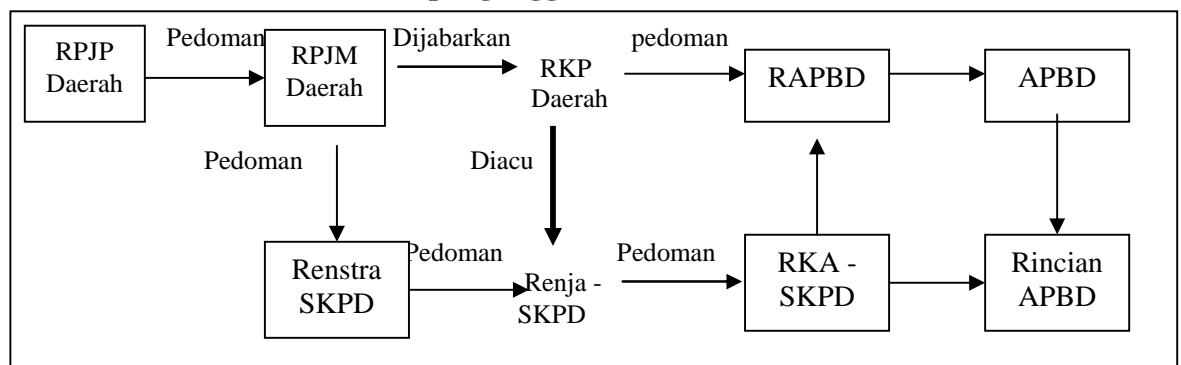
**Gambar 1.5**  
**Proses Penyusunan Rancangan APBD**



Keterkaitan antara RPJM dengan rangkaian dokumen perencanaan lainnya mulai dari PPJP, RPJM, Renstra SKPD, Renja

SKPD, RKPD dan APBD yaitu dapat dilihat pada gambar 1.6 sebagai berikut :

**Gambar 1.6**  
**Alur Perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah**



Sumber : (Dadang Solihin, 2005:16).

Dari adanya penjelasan diatas maka penelitian mengenai Analisis Renstra terhadap Renja dapat peneliti lakukan yaitu dengan menganalisis Renstra SKPD Tahun 2008-2013 dan Renja SKPD Tahun 2008 dan 2009 yang dimiliki oleh Dinperindakop Kabupaten Banyumas

## I.6 Batasan Konsep Penelitian

Konsep-konsep yang diidentifikasi dalam menganalisis kesesuaian antara RENSTRA Tahun 2008-2013 dengan RENJA Tahun 2008-2009 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Rencana strategis merupakan satuan kerja yang dilakukan oleh suatu instansi atau dinas dan suatu perusahaan berisikan mengenai visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut dengan tujuan mengembangkan ketrampilan, sumber daya dan komitmen yang

diperlukan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk melangkah mencapai tujuan akhir organisasi.

2. Rencana Kerja adalah pedoman yang berisikan program dan kegiatan yang berdasarkan atas Renstra untuk periode 1 (satu) tahun, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
3. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga atau masyarakat yang dikordinasikan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
4. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dengan memperhatikan lingkungan yang ada dalam organisasi, baik lingkungan internal maupun eksternal.
5. Analisis Perbandingan Renstra dan Renja adalah analisis yang dilakukan dengan menganalisis Renstra SKPD Tahun 2008-2013 dan Renja SKPD Tahun 2008 dan 2009 yang dimiliki oleh Dinperindakop Kabupaten Banyumas terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinperindakop Kabupaten Banyumas.

### **I.7 Kerangka Berfikir**

Kerangka berpikir bertujuan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana kerangka pikir yang akan digunakan peneliti untuk mengkaji dan memahami permasalahan yang akan diteliti, ini dikemukakan oleh (Sutopo, 2006:176, sajian kerangka pikir meski tidak harus disertai atau diwujudkan

dalam bentuk gambar diagram, namun kebanyakan untuk kejelasan pola pikir disajikan. Namun karena gambar diagram merupakan sajian ringkas, maka bagian kerangka pikir ini selalu memerlukan deskripsi kalimat yang bersifat penjelasan mengenai pola pikir yang digunakannya untuk pemahaman dan analisisnya.

Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Banyumas sangat mendukung Dinperindakop dalam mengembangkan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi dengan tujuan untuk memajukan daerah dan membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha yang akan ditekuni. Dinperindakop Kabupaten Banyumas harus memiliki strategi dan perencanaan yang baik dalam rangka turut berupaya mewujudkan perekonomian yang lebih adil dan merata berdaya saing dengan basis efisiensi, berbasis sumber daya alam dan berkeunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global.

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 menjelaskan bahwa keberadaan RPJMD Kabupaen Banyumas tahun 2008-2013 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan pemerintah yang akan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penyusunan Rencana Strategis SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersifat indikatif yang nantinya akan dijabarkan menjadi



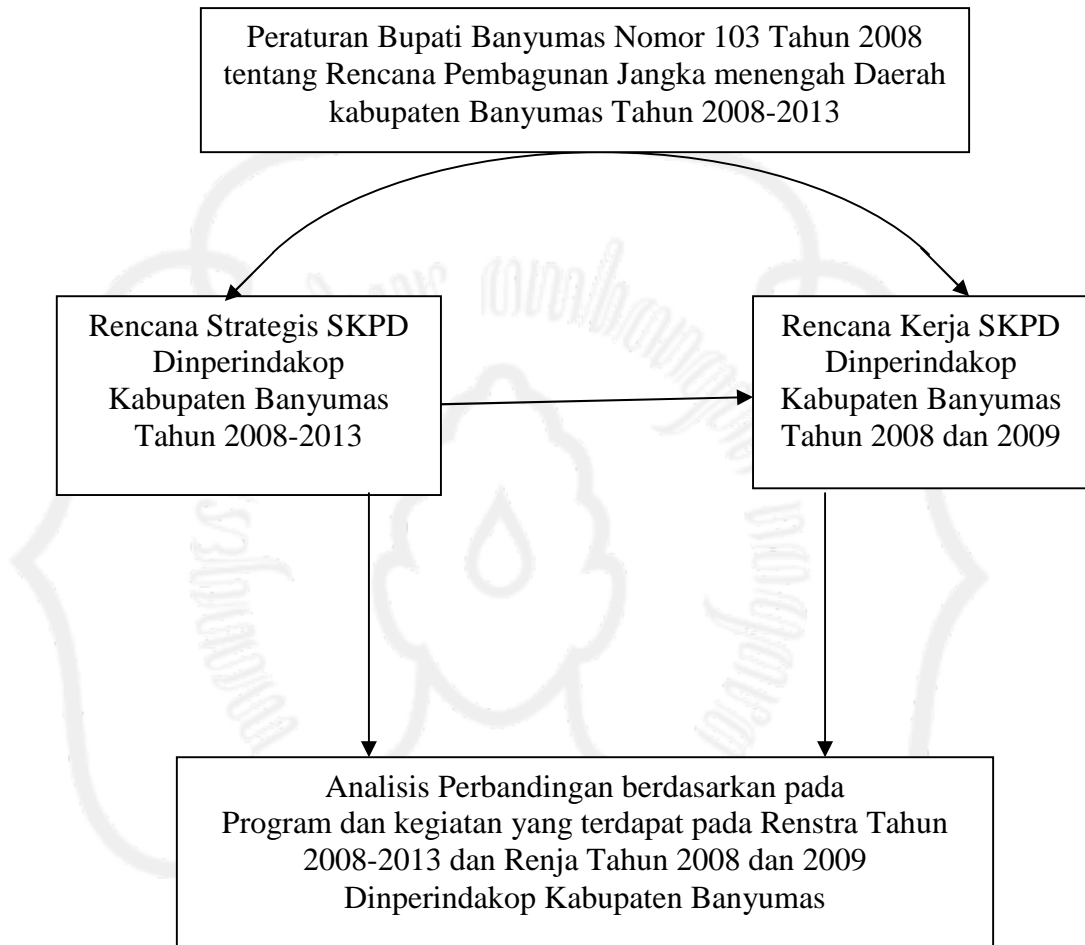
Rencana Kerja Satuan Perangkat daerah (Renja SKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan bagi SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada di bidang pembangunan industri, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah. Renstra ini diperlukan dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyumas bidang industri, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah. Rencana strategis yang telah dibuat selama kurun waktu 5 tahun ini dijabarkan setiap tahunnya, tugas yang dilakukan setiap tahunnya adalah dengan menjabarkan rencana strategis 2008-2013 dalam bentuk rencana kerja.

Maka penelitian mengenai Analisis Renstra terhadap Renja ( Program dan kegiatan) yang peneliti lakukan yaitu dengan menganalisis Renstra SKPD Tahun 2008-2013 dan Renja SKPD Tahun 2008 dan 2009 yang dimiliki oleh Dinperindakop Kabupaten Banyumas. Peneliti hanya membatasi pada program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinperindakop Kabupaten Banyumas.

Untuk lebih memperjelas kerangka berfikir ini, akan peneliti sajikan dalam bentuk gambar (*Gb 1.7*), seperti dibawah ini :

**Gambar I.7**  
**Kerangka Pikir**  
**Analisis Perbandingan Rencana Strategis Tahun 2008-2013 Terhadap**  
**Rencana Kerja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas**



## **I.8 Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif Kualitatif . Menurut (H.B. Sutopo, 2006:111) Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mengarah pada pendeskrisian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Metode kualitatif merujuk pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, apa yang ditulis dan dikatakan oleh orang /tingkah laku yang diamati. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan mengenai Analisis perbandingan antara Rencana Strategis Tahun 2008-2013 dengan Rencana Kerja Tahun 2008 dan 2009 di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Kabupaten

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian tentang Analisis Perbandingan Rencana Strategis Tahun 2008-2013 Terhadap Rencana Kerja Tahun 2008 dan 2009 di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Kabupaten Banyumas studi kasus program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra dan Renja.

Beralamat di Jl. Jendral Gatot Subroto Purwokerto No 32 Kabupaten Banyumas. Alasan-alasan pemilihan lokasi ini adalah :

- a. Untuk menganalisis Keterkaitan antara Renstra tahun 2008-2013 dan renja Tahun 2008 dan 2009 mengenai : Jumlah Kesamaan Program dan Kegiatan Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun

2008 dan 2009, Perbandingan Ketidaksesuaian Program dan Kegiatan Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008-2009 dan Program dan Kegiatan Tambahan pada Renja Tahun 2008-2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas.

- b. Pihak Dinas Perindustrian, perdagangan dan koperasi sangat mendukung untuk memberikan data-data atau informasi yang penulis butuhkan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
- c. Belum adanya penelitian sejenis yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian di Dinas Perindustrian, perdagangan dan koperasi.

### **3. Jenis Data**

Untuk mengetahui bagaimana analisis Keterkaitan Program dan Kegiatan antara Renstra tahun 2008-2013 dan Renja Tahun 2008 dan 2009 maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

- a. Data primer yaitu data yang biasanya diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original (Kuncoro,2001:25). Data primer ini diperoleh dari :
  1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas
  2. Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas

- b. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro,2001:25). Data ini diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Banyumas. Data ini berupa Renstra Tahun 2008-2013, Renja SKPD Tahun 2008 dan 2009 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2008 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas Tahun 2008.

#### **4. Tahapan Penelitian**

Dalam penelitian ini ada 2 tahapan penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

a. Analisis dokumen

Analisis dokumen dilakukan untuk mengetahui mengenai jumlah program dan kegiatan yang terdapat pada Rentra dan Renja di Dinperindakop Kabupaten Banyumas. Pada penelitian Kuantitatif eksploratif, ini analisa dokumen dilakukan dengan uji statistika. Menurut McNabb uji statistik dapat dilakukan dalam berbagai cara. Inilah yang beliau kemukakan, yaitu sebagai berikut:

“The statistical tests typically used in quantitative public administration research to answer questions such as these include, but are not limited to, the following:

- Measures of central tendency, variability, and/or dispersion
- Graphic methods, such as tables, charts, and graphs
- Hypothesis tests
- Association (correlation) tests
- Regression analysis
- A few tools for specific purposes, such as time series and quality tests” (2002: 84)

Dalam hal uji statistika peneliti menggunakan uji statistika dengan menggunakan metode grafik seperti tabel, bagan dan grafik.

b. Analisa wawancara

Analisa wawancara dilakukan untuk membandingkan dokumen dengan hasil dari *key informant* Dalam tahapan ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih informannya. Informan yang dipilih adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas sebagai *key informant* karena informan inilah yang dianggap mengetahui analisis Keterkaitan Program dan Kegiatan antara Renstra tahun 2008-2013 dan Renja Tahun 2008 dan 2009. Informan-informan berikutnya juga dipilih atau ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan tertentu.

### 5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dilakukan untuk menguji penelitian yang bersifat kualitatif dimana peneliti mendasarkan landasan kaitan teori yang digunakan, keingintahuan pribadi, karakteristik yang dihadapi, dan sebagainya. Sampel lebih mengarah pada generalisasi teoritisnya. Sampel menurut (Susanto,2006:114) adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian. Sumber data yang digunakan disini tidak sebagai yang mewakili populasinya tetapi lebih cenderung mewakili informasinya.

Untuk itu penarikan sample yang digunakan bersifat *purposive sampling*, dengan memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Selain itu, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu peneliti menjumpai informan pertama yang kemudian selanjutnya yang atas arahan informan pertama tersebut peneliti memilih informan lain yang lebih tahu sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam memperoleh data, sehingga peneliti mampu menggali data secara lengkap dan mendalam (H.B.Sutopo, 2008:65).

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Wawancara**

Wawancara menurut Lincoln dan Guba dalam (Moleong, 2008:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Wawancara diadakan secara langsung terhadap pihak yang bersangkutan, pihak yang bersangkutan disini adalah mereka yang dianggap mengerti dan dapat

dipercaya menjadi sumber data yang akurat dan mendalam penguasaanya terhadap data tersebut.

Dalam penelitian ini, proses wawancara dilakukan secara formal dan informal dengan cara tanya jawab dengan terlebih dahulu membuat kerangka garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam proses wawancara tersebut, serta dilakukan dalam waktu dan kondisi yang dianggap paling tepat guna mendapatkan kejelasan tentang hal yang berkaitan analisis Keterkaitan antara Renstra tahun 2008-2013 dan Renja Tahun 2008-2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mencatat data-data, dokumen-dokumen, arsip-arsip yang ada yang mencakup semua informasi yang berupa tulisan atau gambar dan ketentuan-ketentuan yang ada (Susanto,2006:137).

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang bersumber dari arsip/dokumen yang terdapat di berbagai instansi terkait yaitu dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten banyumas sendiri, serta dari media massa yang pernah diterbitkan. Selain itu juga menggunakan data yang bersumber dari buku kepustakaan, hasil penelitian dan arsip/dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.



### 3. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar. Teknik secara observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Susanto,2006:126). Dalam observasi ini peneliti tidak bersifat pasif sebagai pengamat, tetapi memainkan peran yang dimungkinkan dalam situasi yang berkaitan dengan penelitiannya, dengan mempertimbangkan akses yang biasa diperolehnya yang bisa dimanfaatkan bagi pengumpulan data.

### 7. Validitas Data

Validitas data yang dimaksudkan sebagai bahwa data yang diperoleh akurat atau sesuai dengan kenyataan atau fakta. Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu untuk memperoleh kemantapan dan kebenaran data, peneliti memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperoleh dengan menggunakan teknik triangulasi data (triangulasi sumber). Maksudnya adalah mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data, peneliti wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia.

## 8. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada proses analisa yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984). Dalam HB. Sutopo (2006:117), ada tiga komponen yang merupakan model yang terjalin atau Model interaktif, yaitu :

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi dari semua jenis informasi yang tertulis lengkap dalam catatan lapangan (Fieldnote), (Sutop,2006:114). Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan data. reduksi dimulai sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus, menyusun pertanyaan penelitian, dan juga waktu menentukan cara pengumpulan data yang akan digunakan. Pada waktu pengumpulan data berlangsung, reduksi data yang dilakukan dengan memuat ringkasan dari catatan data yang diperoleh dari lapangan. Dalam menyusun ringkasan tersebut peneliti memuatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan, dan juga menulis memo. Proses

reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian selesai disusun. Penelitian ini hanya dibatasi pada analisis Keterkaitan Program dan Kegiatan antara Renstra tahun 2008-2013 dan Renja Tahun 2008-2009 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas.

## 2. Sajian Data

Sajian data sebagai komponen analisis kedua, menurut (Sutopo,2006:114) sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data yang baik dan jelas sistematikanya, akan banyak menolong peneliti sendiri dalam menyelesaikan pekerjaannya.

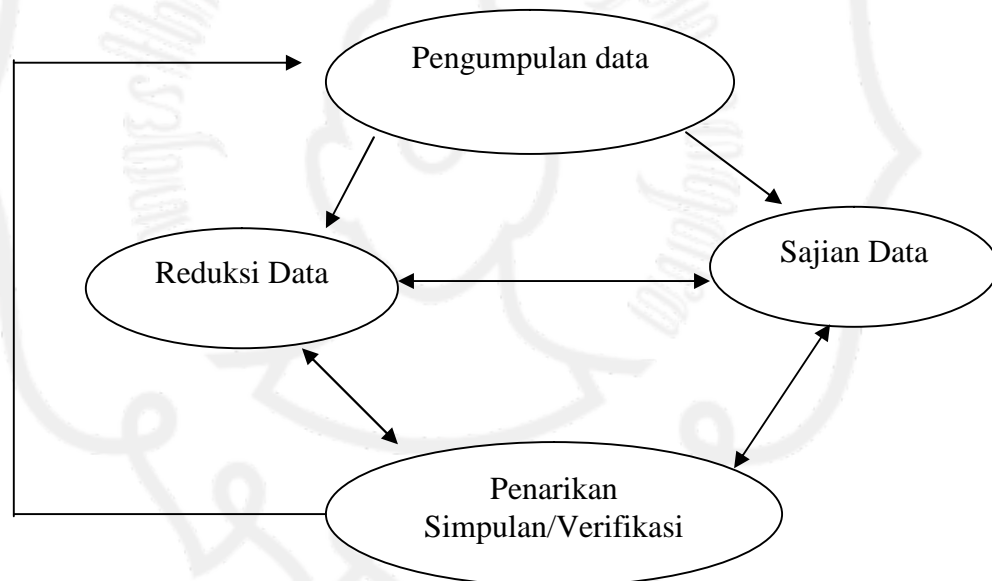
## 2. Penarikan Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai proposisi. Aktifitas diantara ketiga komponen analisis tersebut dapat dilakukan dengan cara interaksi, baik antar komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses

yang berbentuk siklus. Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak diantara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak diantara ketiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Untuk lebih jelasnya secara sederhana prosesnya dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1.8**  
**Skema Model Analisis Interaktif**



*Sumber : H.B. Sutopo (2006:120).*

## **BAB II**

### **DESKRIPSI LOKASI**

#### **2.1 Letak Geografis Kabupaten Banyumas**

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bagian wilayah Propinsi Jawa Tengah yang secara astronomis terletak diantara  $108^{\circ} 39'17''$  -  $109^{\circ} 27'15''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 15'05''$ -  $7^{\circ} 37'10''$  Lintang Selatan, yang terbentang dari arah barat ke timur dengan panjang bentangan 96 km. Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha atau sekitar 4,08 % dari wilayah Jawa Tengah. Luas wilayah tersebut terbagi menjadi lahan sawah sekitar 33.068 Ha atau 24,91 % dan 10.308 Ha sawah dengan pengairan teknis. Sedangkan sisanya 99.691 Ha atau 75,09 % merupakan lahan bukan sawah dengan 19.522 Ha merupakan tanah untuk bangunan dan pekarangan. Perubahan status lahan sawah menjadi non sawah dalam periode lima tahun terakhir (1997 – 2001) 863,6 hektar lahan sawah berubah fungsi terutama menjadi daerah permukiman. Hal ini terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, termasuk pendatang dari luar wilayah Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Kabupaten Banyumas secara administratif dibagi menjadi 27 kecamatan yang terdiri dari 331 desa/kelurahan. Kecamatan Cilongok merupakan wilayah yang paling luas yaitu 105,34 Km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Purwokerto Purwokerto Barat merupakan wilayah yang paling sempit 7,40 Km<sup>2</sup>. Dalam lingkup regional, letak Kabupaten Banyumas

memiliki posisi yang sangat strategis dalam konteks pengembangan wilayah di Propinsi Jawa Tengah karena beberapa aspek, yaitu :

1. Kabupaten Banyumas berada pada persimpangan perhubungan lintas daerah, yakni jalur Jawa Barat – Cilacap, Jawa Barat – DIY, Jawa Barat – Pegunungan Dieng dan sekitarnya.
2. Kabupaten Banyumas berada dalam rangkaian situs pariwisata lintas provinsi, yakni kawasan Pancimas (Pengandaran, Cilacap, dan Banyumas). Hal ini dapat membuka peluang bagi perkembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas, baik dari segi pengembangan obyek wisata, fasilitas pendukung pariwisata maupun aksesibilitas untuk mencapai obyek wisata.
3. Dalam struktur kewilayahan nasional, Kabupaten Banyumas menjadi salah satu pusat pengembangan kawasan penting di wilayah tengah dan berada di jalur transportasi nasional lintas selaan dengan jangkauan pelayanan meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten wonosobo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo. Hal itu menambah peluang untuk meningkatkan potensi internal seperti fasilitas pendidikan (khususnya perguruan tinggi) dan pariwisata yang berskala nasional.
4. Dalam sruktur pengembangan regional Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas diposisikan sebagai kawasan prioritas dengan arah pengembangan kawasan basis pertanian, kawasan perbatasan antar propinsi, kawasan konservasi ekologis dan perlindungan terhadap

bencana alam termasuk banjir dan tanah longsor di Jawa Tengah bagian selatan.

5. Letak Kabupaten Banyumas yang berdekatan dengan Kabupaten Cilacap sebagai kawasan industri di Jawa Tengah bagian selatan, memberikan peluang untuk menjadi pendukung kegiatan industri baik dari segi penyediaan sumber material maupun bahan dasar.

Kabupaten Banyumas merupakan pusat pengembangan kawasan di dalam kerangka pembangunan nasional dengan pusat pengembangan di kota Purwokerto dan wilayah pelayanannya meliputi beberapa kota seperti Purbalingga, Banjarnegara, Sokaraja, Ajibarang, Wangon dan Cilacap. Selain itu, dalam Rencana Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah, Kota Purwokerto ditetapkan sebagai kota Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Hal ini bertitik tolak dari fungsi Kota Purwokerto pada khususnya dan Kabupaten Banyumas pada umumnya sebagai daerah yang mempunyai peranan penting di bagian barat daya Propinsi Jawa Tengah. Selain itu keberadaan fasilitas pendidikan yang berskala nasional seperti perguruan tinggi negeri Universitas Jenderal Sudirman, kawasan wisata Baturaden dan saat ini sedang dikembangkan kawasan Kebun Raya di kaki Gunung Slamet menjadikan Kota Purwokerto semakin penting perannya.

Hampir setengah dari luas wilayah Kabupaten Banyumas merupakan kawasan budidaya pertanian dengan tingkat kesuburan yang cukup baik. Namun demikian dari pemanfaatan tanah yang ada masih belum maksimal penggunaannya terhadap kegiatan produktif. Guna menjaga keseimbangan

ekosistem dan ketahanan pangan nasional, maka Kabupaten Banyumas dijadikan salah satu daerah produksi pangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 21 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah, Perda tersebut diperkuat dengan adanya kesepakatan antara Bupati/Walikota se Jateng untuk mempertahankan lahan sawah yang produktif dari alih fungsi lahan.

Berkaitan dengan hal tersebut, sektor pertanian sebagai basis perekonomian rakyat yang menghidupi sebagian besar penduduk Kabupaten Banyumas perlu didorong oleh pembangunan industri yang menyediakan input produksi dan mengolah hasil-hasil pertanian (agro industri). Aktivitas perdagangan antar daerah di Kabupaten Banyumas yang meliputi perdagangan barang-barang produksi antara lain produksi hasil pertanian, hasil industri dan hasil penggalian, aktivitas hotel dan losmen serta restoran dan rumah makan masih mempunyai peluang untuk ditingkatkan. Hal ini ditunjang dengan dimilikinya pusat perdagangan yang terletak di Kota Purwokerto, Ajibarang dan Wangon yang merupakan pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Banyumas.

## **2.2 Potensi pendukung Dinperindakop Kabupaten Banyumas**

Dinas Perindagkop Kabupaten Banyumas menempati tanah seluas 1.875 m<sup>2</sup> dan bangunan seluas 1.312 m<sup>2</sup>, sehingga ruang kerja bagi pegawai terlalu sempit. Oleh karena itu, sebagian pegawai (Bidang Koperasi sebanyak 4 pejabat dan 16 staf) menempati bangunan Dinas Sumber Daya



Air dan Bina Marga seluas 144 m<sup>2</sup>. Pada tahun 2009 atau 2010 akan segera dibangun kantor bagi Bidang Koperasi agar dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik dan layak.

Dinas Perindagkop Kabupaten Banyumas memiliki sarana dan prasarana pendukung yang dapat digunakan untuk kelancaran kerja antara lain :

*Tabel 2.1*

***Rekapitulasi Barang Inventaris Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas Tahun 2008***

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
<b>A</b>	<b>TANAH DAN BANGUNAN</b>		
1.	Tanah kantor Jl. G Subroto	1.312 m <sup>2</sup>	
2.	Tanah Jl. G Soebroto	1.875 m <sup>2</sup>	
3.	Tanah Jl. Printis Kemerdekaan	280 m <sup>2</sup>	
4.	Tanah Pasar Wage	17.017 m <sup>2</sup>	
5.	Tanah Pasar Manis	2.568 m <sup>2</sup>	
6.	Tanah Pasar Pon	4.784 m <sup>2</sup>	
7.	Tanah Pasar Karanglewas	3.200 m <sup>2</sup>	
8.	Tanah Pasar Sarimulyo	2.800 m <sup>2</sup>	
9.	Tanah Pasar Pahing	2.100 m <sup>2</sup>	
10.	Tanah Pasar Cikebrok	1.000 m <sup>2</sup>	
11.	Tanah Pasar Sumpiuh	14.390 m <sup>2</sup>	
12.	Tanah Pasar Sokaraja	14.410 m <sup>2</sup>	
13.	Tanah Pasar Sangkal putung	2.850 m <sup>2</sup>	
14.	Tanah Pasar Larangan	1.400 m <sup>2</sup>	
15.	Tanah Pasar Kemukusan	2.400 m <sup>2</sup>	
16.	Tanah Pasar Ajibarang	35.995,92 m <sup>2</sup>	
17.	Tanah Pasar Hw Ajibarang	1.125 m <sup>2</sup>	
18.	Tanah Pasar Karang tengah	1.357 m <sup>2</sup>	
19.	Tanah Pasar Cilongok	8.245 m <sup>2</sup>	
20.	Tanah Pasar Legok	118 m <sup>2</sup>	
21.	Tanah Pasar Jatilawang	4.800 m <sup>2</sup>	
22.	Tanah Pasar Wangon	9.753 m <sup>2</sup>	
23.	Tanah Pasar Banyumas	4.100 m <sup>2</sup>	
24.	Tanah Pasar Buntu	4.800 m <sup>2</sup>	
25.	Tanah Pasar Tambak	13.729 m <sup>2</sup>	
26.	Tanah Pasar Wijahan	4.710 m <sup>2</sup>	
27.	Bangunan G. Kantor	175 m <sup>2</sup>	
28.	Bangunan G. R Dinas	126 m <sup>2</sup>	
29.	Bangunan Pasar Wage	40 m <sup>2</sup>	
30.	Bangunan Pasar Manis	35 m <sup>2</sup>	
31.	Bangunan Pasar Pon	35 m <sup>2</sup>	

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
32.	Bangunan Pasar Karanglewas	25 m <sup>2</sup>	
33.	Bangunan Pasar Sarimulyo	20 m <sup>2</sup>	
34.	Bangunan Pasar Pahing	25 m <sup>2</sup>	
35.	Bangunan Pasar Sumpiuh	33 m <sup>2</sup>	
36.	Bangunan Pasar Sokaraja	84 m <sup>2</sup>	
37.	Bangunan Pasar Sangkal putung	12 m <sup>2</sup>	
38.	Bangunan Pasar Larangan	12 m <sup>2</sup>	
39.	Bangunan Pasar Kemukusan	12 m <sup>2</sup>	
40.	Bangunan Pasar Ajibarang	40 m <sup>2</sup>	
41.	Bangunan Pasar Cilongok	40,5 m <sup>2</sup>	
42.	Bangunan Pasar Legok	56 m <sup>2</sup>	
43.	Bangunan Pasar Jatilawang	13,75 m <sup>2</sup>	
44.	Bangunan Pasar Wangon	40 m <sup>2</sup>	
45.	Bangunan Pasar Banyumas	35 m <sup>2</sup>	
46.	Bangunan Pasar Wijahan	37 m <sup>2</sup>	
47.	Bangunan Pasar Buntu	20 m <sup>2</sup>	
48.	Bangunan Pasar Tambak	21,6 m <sup>2</sup>	
<b>B</b>	<b>ALAT TRANSPORTASI</b>		
	<b>KENDARAAN RODA EMPAT</b>		
1.	Mobil Kijang STDLG	1 unit	
2.	Mobil Kijang Super Station	1 unit	
3.	Mobil Zebra Jumbo	1 unit	
4.	Mobil L 300 Bak Terbuka	1 unit	
5.	Mobil Zebra Bak Terbuka	1 unit	
6.	Mobil Kijang Avanza.E.VTI	1 unit	
7.	Mobil Toyota Kijang	5 unit	
8.	Dump Truk Toyota	1 unit	
9.	Dump Truk Mitsubishi	2 unit	
10.	Dump Truk Dyna	2 unit	
	<b>KENDARAAN RODA DUA</b>		
1.	Sepeda Motor Suzuki	6 unit	
2.	Sepeda Motor Honda	7 unit	
3.	Sepeda Motor Honda Win	8 unit	
4.	Sepeda Motor Suzuki A 100	4 unit	
5.	Sepeda Motor Honda Star	1 unit	
6.	Sepeda Motor GL Max	3 unit	
7.	Sepeda Motor Honda MCB	1 unit	
8.	Sepeda Motor Honda Supra Fit	1 unit	
9.	Sepeda Motor Suzuki Smash	1 unit	
<b>C.</b>	<b>PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>		
	<b>KOMPUTER</b>		
1.	Note Book / Laptop	6 unit	
2.	Pc rancang sendiri / rakitan	27 unit	

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
3.	Printer	17 unit	
4.	UPS.	5 unit	
5.	Stabilizer	7 unit	
6.	Meja komputer	3 buah	
7.	Scanner Cano Scan lide 60	1 unit	
8.	Keyboard	2 buah	
9.	Mouse	2 buah	
	<b>MEUBELER</b>		
1.	Meja Biro	6 buah	
2.	Meja 1/2 Biro	370 buah	
3.	Meja Biro sedang Uk 150x75x75	2 buah	
4.	Meja kerja kecil	4 buah	
5.	Meja - Kursi Kerja Activi	3 buah	
6.	Meja Kerja	1 buah	
7.	Meja Rapat	1 buah	
8.	Meja Karcis	33 buah	
9.	Meja kursi kayu	1 buah	
10.	Meja - Kursi Tamu	1 buah	
11.	Kursi Tamu	10 buah	
12.	Kursi Rapat	12 buah	
13.	Kursi Lipat	123 buah	
14.	Kursi lipat mdl tanpa tangan	1 buah	
15.	Kursi putar mdl tangan	30 buah	
16.	Kursi Kerja	12 buah	
17.	Kursi Sudut Minimalis	1 buah	
18.	Kursi Rotan/ jok	285 buah	
19.	Bangku Panjang	5 buah	
20.	Almari Arsip	68 buah	
21.	Almari Arsip/ Laci	1 buah	
22.	Almari 4 pintu	1 buah	
23.	Lemari Kayu	1 buah	
24.	Lemari Rak Buku	1 buah	
25.	Lemari Bifet	1 buah	
26.	Lemari buku/Kaca	2 buah	
27.	Lemari kaca arsip	14 buah	
	<b>ALAT RUMAH TANGGA</b>		
28.	Filling Kabinet	36 buah	
29.	Filling Plastik	3 buah	
30.	Rak Plastik	2 buah	
31.	Rak Kayu	5 buah	
32.	Rak Besi	8 buah	
33.	Brankas Kecil	7 buah	
34.	Brankas Besar	1 buah	
35.	Kipas Angin	22 buah	
36.	Mesin Tik	48 buah	
37.	Air Conditioner (AC)	7 unit	
38.	Tape Recorder	7 unit	
39.	LCD Projector	4 buah	

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
40.	Layar proyektor	1 buah	
41.	Handycam	2 buah	
42.	Kamera	5 buah	
43.	Kalkulator	26 buah	
44.	Jam Dinding	32 buah	
45.	Board Struktur Organisasi	1 buah	
46.	Papan Pengumuman	24 buah	
47.	Papan white board	5 buah	
48.	Tabung pemadam kebakaran	32 buah	
49.	Kompor Gas	1 buah	
50.	Tabung Gas	1 buah	
51.	Lemari Es	2 unit	
52.	Lampu Hias Jalan	1 buah	
53.	gerobag	30 buah	
	<b>PERALATAN KOMUNIKASI</b>		
1.	Pesawat telephone	6 buah	
2.	Sentral telephon PABX	1 unit	
3.	Mesin faximile thermalpaper	2 unit	
4.	Wareless	2 unit	
5.	Megaphone	1 unit	
6.	Speaker	1 unit	
7.	Sound System untuk Upacara	1 unit	
8.	Sound System untuk Ruangan	1 unit	

### 2.3 Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengantisipasi tantangan di masa depan, maka Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas mempunyai Visi untuk Tahun 2008-2013 adalah :

” TERWUJUDNYA INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM YANG MAJU DAN BERDAYA SAING ”

Sebagai perwujudan visi tersebut diatas ditetapkanlah misi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas. Misi harus memperlihatkan secara jelas tahapan yang penting dalam proses implementasinya dan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan visi. Untuk mencapai visi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

” MEMBERDAYAKAN USAHA INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PENINGKATAN KELEMBAGAAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, FASILITASI PEMBIAYAAN DAN KEMITRAAN.”

#### **2.4 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas, dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, serta lingkungan strategis. Maka dapat ditetapkan tujuan pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah agar maju dan berdaya saing yang selaras dengan tujuan RPJM Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013.

Tujuan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas pada dasarnya adalah menghasilkan pelayanan yang bermutu, akuntabel dan transparan untuk meningkatkan pelayanan kepada usaha industri dan perdagangan, meliputi :

1. Terwujudnya kinerja organisasi yang efektif dan efisiensi
2. Terwujudnya pelayanan yang bermutu dalam rangka memperdayakan usaha industri dan perdagangan
3. Terwujudnya kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat secara lebih merata
4. Terwujudnya struktur industri yang kuat
5. Semakin banyaknya IKM yang berbasis pada hasil karya intelektual yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya secara optimal
7. Meningkatnya persebaran IDKM
8. Meningkatnya pemasaran dalam negeri dan ekspor produk IKM
9. Terwujudnya sistem distribusi barang dan jasa yang efisien
10. Terwujudnya upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya Banyumas
11. Terselenggaranya sistem informasi dan konsultasi yang efektif tentang potensi, teknologi dan akses permodalan.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas dalam pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah adalah:

1. Semakin meningkatnya jumlah unit-unit usaha IDKM baru yang tersebar merata di wilayah Kabupaten Banyumas
2. Meningkatnya penciptaan lapangan kerja baru di segmen IDKM, yang tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas

3. Meningkatnya secara nyata sumbangan nilai tambah IKM, dengan dampak pemerataan pendapatan ke seluruh wilayah Kabupaten banyumas
4. Meningkatnya daya saing produk IKM sehingga ekspor produk IKM meningkat.

## **2.5 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  
Pembangunan Nasional
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan  
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Sistem Informasi  
Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  
Keuangan Daerah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
13. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas.
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 43 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas.

## **2.6 Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja**

Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Banyumas mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan



daerah bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Banyumas antara lain :

1. Perumusan Kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas, fungsi dan tata kerjanya.

Sedangkan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Banyumas antara lain :

1. Kepala Dinas membawahi Sekretariat, Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional, sekretariat membawahi Sub Bagian sedangkan Bidang Membawahi Seksi
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas
3. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Melalui Sekretaris

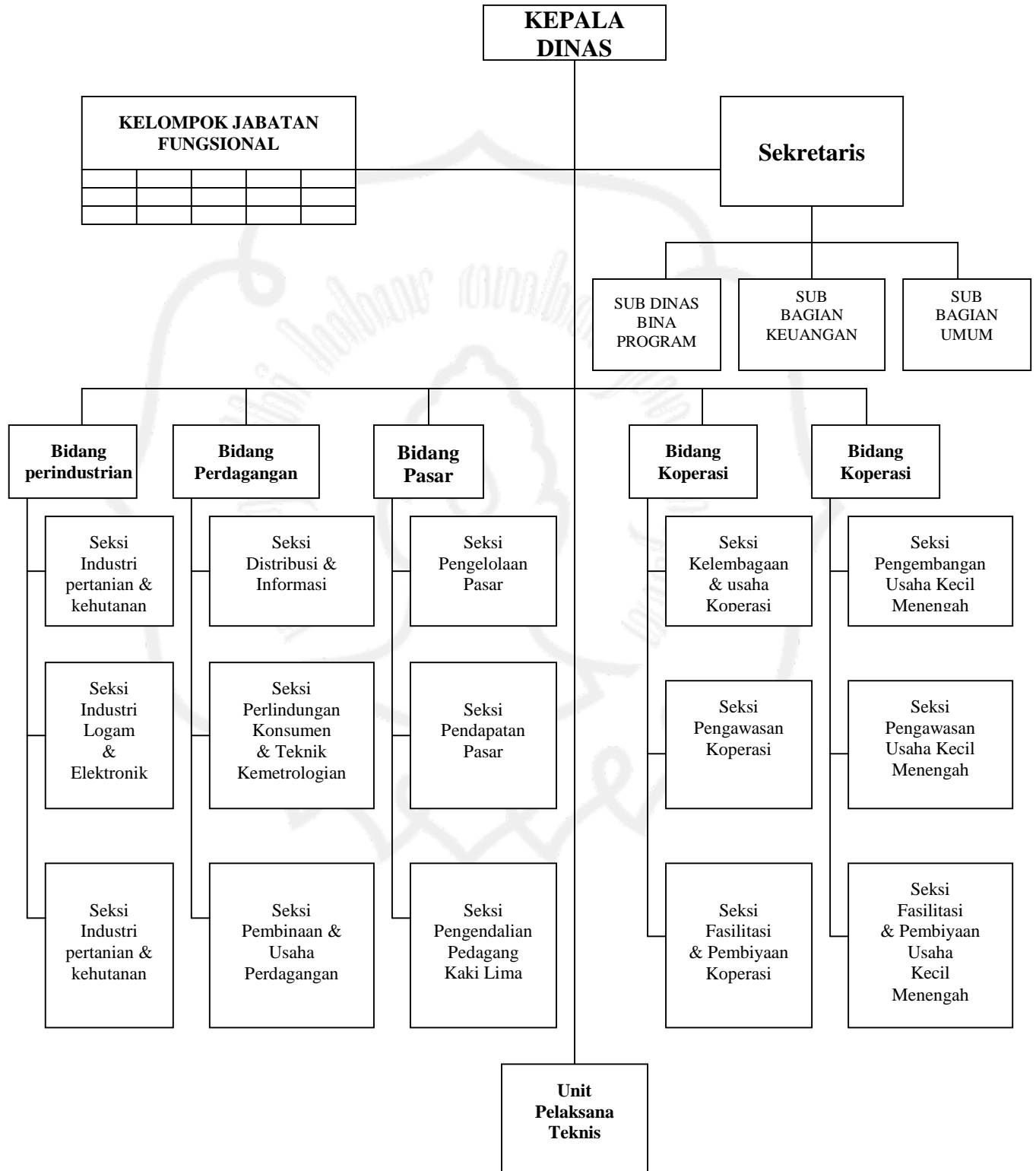
4. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
5. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
6. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan Di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

## **2.7 Struktur Organisasi**

Setiap instansi baik pemerintah maupun swasta perlu ditetapkan adanya struktur organisasi. Pengertian Struktur Organisasi itu sendiri adalah kerangka antar hubungan satuan-satuan orang yang didalamnya terdapat pejabat, tugas dan tanggungjawab yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh.

Adapun kegunaan struktur organisasi adalah untuk mengatasi status dan kedudukan pegawai serta struktur organisasi, juga menetapkan kelancaran jalannya pelaksanaan proses jalannya pekerjaan masing-masing karyawan mengetahui benar tugas yang dibebankan dan mereka mampu mengerjakan pekerjaan itu sampai selesai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat struktur organisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi**  
**Kabupaten Banyumas Berdasar Perda No. 11 Tahun 2008 tentang SOTK**  
**Pemerintah Kabupaten Banyumas**



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 28 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, maka Susunan organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Program
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum
3. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
  - a. Seksi Industri Pertanian dan Kehutanan
  - b. Seksi Industri Logam dan Elektronik
  - c. Seksi Industri Kerajinan dan Aneka
4. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
  - a. Seksi Distribusi dan Informasi
  - b. Seksi Perlindungan konsumen dan Teknik Kemetrolgian
  - c. Seksi Pembinaan dan Pengendalian usaha Perdagangan
5. Bidang Pasar, Terdiri dari:
  - a. Seksi Pengelolaan Pasar
  - b. Seksi Pendapatan Pasar
  - c. Seksi Pengendalian Pedagang Kaki Lima

6. Bidang Koperasi, Terdiri dari :
  - a. Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi
  - b. Seksi Pengawasan Koperasi
  - c. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi
7. Bidang Usaha Kecil Menengah, Terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan Usaha Kecil
  - b. Seksi Pengawasan Usaha Kecil Menengah
  - c. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas
9. Kelompok Jabatan Fungsional

## **2.8 Uraiana Tugas**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 28 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, maka Susunan organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
  - a. Menyusun kebijakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah
  - b. Menyusun materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah

- c. Memimpin penyelenggaraan pembinaan dan pemgembangan industri pertanian, kehutanan, logam, mesin, elektronik, kerajinan dan aneka industri lainnya, perdagangan dalam dan luar negeri, perlindungan konsumen, kemetrolagian, pengendalian dan pengawasan usaha perdagangan, pengelolaan dan pendapatan pasar dan PKL, pengembangan, pengawasan, fasilitasi dan pembiayaan bagi koperasi dan UKM
  - d. Menandatangani pemberian rekomendasi dan atau izin berkaitan dengan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah
  - e. Mengarahkan penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah
  - f. Melaksanakan pembinaan seluruh kegiatan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah
  - g. Melaksanakan Pengawasan terhadap kegiatan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah
2. Sekretariat
    - a. Merumuskan kebijakan teknis tentang pengelolaan administrasi surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian serta perlengkapan dan kerumahtanggaan
    - b. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan administrasi surat-menyurat

- c. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan
- d. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan kehumasan
- e. Mengkoordinasikan kegiatan keprotokolan
- f. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian
- g. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan perlengkapan dan kerumahtanggaan dinas pengelolaan sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dll.
- h. Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Dinas
- i. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan usulan program dan kegiatan dinas
- j. Mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
- k. Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan termasuk di dalamnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- l. Mengkoordinasikan kegiatan koreksi rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran dari masing-masing Nama jabatan/ pimpinan kegiatan

- m. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai serta pembiayaan kegiatan
- n. Mengkoordinasikan kegiatan verifikasi/ pemeriksaan administrasi dan surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dinas
- o. Mengkoordinasikan kegiatan pencatatan akuntansi keuangan Dinas

### 3. Sub Bagian Program

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis tentang penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan.
- b. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Dinas
- c. Menyelenggarakan pengelolaan usulan program dan kegiatan Dinas
- d. Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
- e. Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan termasuk di dalamnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### 4. Sub Bagian Keuangan

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis tentang pengelolaan administrasi keuangan.



- b. Mengoreksi rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran dari masing-masing Nama Jabatan/ pimpinan kegiatan
  - c. Menyelenggarakan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai serta pembiayaan kegiatan.
  - d. Menyelenggarakan verifikasi / pemeriksaan administrasi dan surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan Dinas
  - e. Menyelenggarakan pencatatan akuntansi keuangan Dinas
5. Sub Bagian Umum
- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis tentang pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawainan, serta perlengkapan dan kerumahtanggaan
  - b. Menyelenggarakan administrasi surat-menyurat
  - c. Menyelenggarakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan
  - d. Menyelenggarakan pelayanan kehumasan
  - e. Menyelenggarakan kegiatan keprotokolan
  - f. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawainan
  - g. Menyelenggarakan pelayanan perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas (Pengelolaan sarana prasarana, kebersihan, keamanan dan lain-lain)

## 6. Kepala Bidang Perindustrian

- a. Merumuskan Kebijakan pembinaan dan pengembangan industri pertanian, kehutanan, logam, mesin, elektronik, kerajinan dan aneka industri lainnya.
- b. Mengoreksi materi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri pertanian, kehutanan, logam, mesin, elektronik, kerajinan dan aneka industri lainnya.
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan industri pertanian, kehutanan, logam, mesin, elektronik, kerajinan dan aneka industri lainnya.
- d. Mengarahkan penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan industri pertanian, kehutanan, logam, mesin, elektronik, kerajinan dan aneka industri lainnya.
- e. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri pertanian, kehutanan, logam, mesin, elektronik, kerajinan dan aneka industri lainnya.
- f. Melaksanakan pengawasan kegiatan pembinaan dan pengembangan industri pertanian, kehutanan, logam, mesin, elektronik, kerajinan dan aneka industri lainnya.

## 7. Kepala Seksi Industri Pertanian dan Kehutanan

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan dan pengembangan industri pertanian dan kehutanan

- b. Menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan industri pertanian dan kehutanan
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan industri pertanian dan kehutanan
- d. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan industri pertanian dan kehutanan
- e. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pembinaan dan pengembangan industri pertanian dan kehutanan
- f. Melaksanakan pengawasan pembinaan dan pengembangan industri pertanian dan kehutanan.

8. Kepala Seksi Industri Logam dan Elektronik

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan dan pengembangan industri logam, mesin dan elektronik.
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan industri logam, mesin dan elektronik.
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan industri logam, mesin dan elektronik.
- d. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan industri logam, mesin dan elektronik.

- e. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pembinaan dan pengembangan industri logam, mesin dan elektronik.
- f. Melaksanakan pengawasan pembinaan dan pengembangan industri logam, mesin dan elektronik.

9. Kepala Seksi Industri Kerajinan dan Aneka

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan dan pengembangan industri kerajinan dan aneka
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan industri kerajinan dan aneka
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan industri kerajinan dan aneka
- d. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan industri kerajinan dan aneka
- e. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pembinaan dan pengembangan industri kerajinan dan aneka
- f. Melaksanakan pengawasan pembinaan dan pengembangan industri kerajinan dan aneka

10. Kepala Bidang Perdagangan

- a. Merumuskan kebijakan monitoring harga, distribusi kebutuhan pokok masyarakat, perlindungan konsumen, kemetrolgian, pelayanan teknis, administrasi rekomendasi perijinan usaha dan legalitas usaha perdagangan.

- b. Mengoreksi materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan kegiatan monitoring harga, distribusi kebutuhan pokok masyarakat, perlindungan konsumen, kemetrolgian, pelayanan teknis, administrasi rekomendasi perijinan usaha dan legalitas usaha perdagangan.
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan monitoring harga, distribusi kebutuhan pokok masyarakat, perlindungan konsumen, kemetrolgian, pelayanan teknis, administrasi rekomendasi perijinan usaha dan legalitas usaha perdagangan.
- d. Mengarahkan penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan monitoring harga, distribusi kebutuhan pokok masyarakat, perlindungan konsumen, kemetrolgian, pelayanan teknis, administrasi rekomendasi perijinan usaha dan legalitas usaha perdagangan.
- e. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pelaksanaan monitoring harga, distribusi kebutuhan pokok masyarakat, perlindungan konsumen, kemetrolgian, pelayanan teknis, administrasi rekomendasi perijinan usaha dan legalitas usaha perdagangan.
- f. Melaksanakan pengawasan kegiatan distribusi kebutuhan pokok masyarakat, perlindungan konsumen, kemetrolgian dan perijinan.

#### 11. Kepala Seksi Distribusi dan Informasi

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan monitoring harga, distribusi kebutuhan pokok dan penyebaran informasi harga.
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan kegiatan monitoring harga, distribusi kebutuhan pokok dan penyebaran informasi harga.
- c. Menyelenggarakan monitoring harga, distribusi kebutuhan pokok dan penyebaran informasi harga.
- d. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan monitoring harga, distribusi kebutuhan pokok dan penyebaran informasi harga.
- e. Melaksanakan pembinaan bagi petugas monitoring harga, distribusi kebutuhan pokok dan penyebaran informasi harga.
- f. Melaksanakan pengawasan kegiatan monitoring harga, distribusi kebutuhan pokok dan penyebaran informasi harga.

#### 12. Kepala Seksi Perlindungan konsumen dan Teknik Kemetrolgian

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan fasilitasi perlindungan konsumen dan kemetrolgian.
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi perlindungan konsumen dan kemetrolgian.
- c. Menyelenggarakan fasilitasi perlindungan konsumen dan kemetrolgian.

- d. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi perlindungan konsumen dan kemetrolgian.
- e. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pelaksanaan kegiatan fasilitasi perlindungan konsumen dan kemetrolgian.
- f. Melaksanakan pengawasan kegiatan fasilitasi perlindungan konsumen dan kemetrolgian.

### 13. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian usaha Perdagangan

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perijinan, pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan.
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan kegiatan perijinan, pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan.
- c. Menyelenggarakan perijinan, pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan.
- d. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan perijinan, pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan.
- e. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pelaksanaan kegiatan perijinan, pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan.
- f. Melaksanakan pengawasan kegiatan perijinan, pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan.

### 14. Kepala Bidang Pasar

- a. Merumuskan kebijakan pengelolaan dan pendapatan pasar serta pengendalian PKL.

- b. Mengoreksi materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pendapatan pasar serta pengendalian PKL.
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan dan pendapatan pasar serta pengendalian PKL.
- d. Mengarahkan penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pendapatan pasar serta pengendalian PKL.
- e. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pelaksanaan pengelolaan dan pendapatan pasar serta pengendalian PKL.
- f. Melaksanakan pengawasan kegiatan pengelolaan dan pendapatan pasar serta pengendalian PKL.

#### 15. Kepala Seksi Pengelolaan Pasar

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penataan, pemeliharaan, dan pengembangan pasar.
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan kegiatan penataan, pemeliharaan, dan pengembangan pasar.
- c. Menyelenggarakan penataan, pemeliharaan, dan pengembangan pasar.
- d. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan penataan, pemeliharaan, dan pengembangan pasar.
- e. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pelaksanaan kegiatan penataan, pemeliharaan, dan pengembangan pasar.



- f. Melaksanakan pengawasan kegiatan penataan, pemeliharaan, dan pengembangan pasar.

#### 16. Kepala Seksi Pendapatan Pasar

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penetapan dan pemungutan pendapatan pasar.
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan kegiatan penetapan dan pemungutan pendapatan pasar.
- c. Menyelenggarakan penetapan dan pemungutan pendapatan pasar.
- d. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan penetapan dan pemungutan pendapatan pasar.
- e. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pelaksanaan kegiatan penetapan dan pemungutan pendapatan pasar.
- f. Melaksanakan pengawasan kegiatan penetapan dan pemungutan pendapatan pasar.

#### 17. Kepala Seksi Pengendalian Pedagang Kaki Lima

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penataan, pembinaan dan pengawasan PKL
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan kegiatan penataan, pembinaan dan pengawasan PKL
- c. Menyelenggarakan penataan, pembinaan dan pengawasan PKL

- d. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan penataan, pembinaan dan pengawasan PKL
- e. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pelaksanaan kegiatan penataan, pembinaan dan pengawasan PKL
- f. Melaksanakan pengawasan kegiatan penataan, pembinaan dan pengawasan PKL

#### 18. Kepala Bidang Koperasi

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan, pengawasan kelembagaan dan usaha serta fasilitasi dan pembiayaan koperasi.
- b. Mengoreksi materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pembinaan, pengawasan kelembagaan dan usaha serta fasilitasi dan pembiayaan koperasi.
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan, pengawasan kelembagaan dan usaha serta fasilitasi dan pembiayaan koperasi.
- d. Mengarahkan penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan kelembagaan dan usaha serta fasilitasi dan pembiayaan koperasi.
- e. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pelaksanaan pembinaan, pengawasan kelembagaan dan usaha serta fasilitasi dan pembiayaan koperasi.
- f. Melaksanakan pengawasan pembinaan, pengawasan kelembagaan dan usaha serta fasilitasi dan pembiayaan koperasi.

#### 19. Kepala Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan, pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi.
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi.
- c. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi.
- d. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi.
- e. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pembinaan, pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi.
- f. Melaksanakan pengawasan pembinaan, pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi.

#### 20. Kepala Seksi Pengawasan Koperasi

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan koperasi.
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan kegiatan pengawasan koperasi.
- c. Menyelenggarakan pengawasan koperasi.
- d. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan koperasi.

- e. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pelaksana kegiatan pengawasan koperasi.
- f. Melaksanakan pengawasan kegiatan pengawasan koperasi.

#### 21. Kepala Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan fasilitasi dan pembiayaan koperasi
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pembiayaan koperasi
- c. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembiayaan koperasi
- d. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pembiayaan koperasi
- e. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pelaksana kegiatan fasilitasi dan pembiayaan koperasi
- f. Melaksanakan pengawasan kegiatan fasilitasi dan pembiayaan koperasi

#### 22. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan, pengawasan dan usaha serta fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil dan menengah.
- b. Mengoreksi materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pembinaan, pengawasan dan usaha serta fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil dan menengah.

- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan usaha serta fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil dan menengah.
- d. Mengarahkan penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan usaha serta fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil dan menengah.
- e. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan usaha serta fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil dan menengah.
- f. Melaksanakan pengawasan kegiatan pembinaan, pengawasan dan usaha serta fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil dan menengah.

### 23. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan menengah

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan, pengembangan usaha kecil dan menengah.
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan usaha kecil dan menengah.
- c. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan usaha kecil dan menengah.
- d. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan usaha kecil dan menengah.
- e. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pembinaan, pengembangan usaha kecil dan menengah.

- f. Melaksanakan pengawasan kegiatan pembinaan, pengembangan usaha kecil dan menengah.

#### 24. Kepala Seksi Pengawasan Usaha Kecil dan Menengah

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan usaha kecil dan menengah.
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha kecil dan menengah.
- c. Menyelenggarakan pengawasan usaha kecil dan menengah.
- d. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha kecil dan menengah.
- e. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pelaksana kegiatan pengawasan usaha kecil dan menengah.
- f. Melaksanakan pengawasan kegiatan pengawasan usaha kecil dan menengah.

#### 25. Kepala Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil dan menengah.
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil dan menengah.
- c. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil dan menengah.

- d. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil dan menengah.
- e. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pelaksana kegiatan fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil dan menengah.
- f. Melaksanakan pengawasan kegiatan fasilitasi dan pembiayaan usaha kecil dan menengah.

26. Unit Pelaksana Teknis Dinas

27. Kelompok Jabatan Fungsional

## **2.9 Identifikasi Pegawai**

Identifikasi pegawai merupakan gambaran mengenai keadaan pegawai yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas. Berikut ini disajikan identifikasi pegawai berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan formal dan kepangkatan / golongan.

Gambaran pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas dimaksud adalah sebagai berikut :

### **1. Struktur pegawai berdasarkan jenis kelamin**

Struktur pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini, dimana jumlah pegawai secara keseluruhan sampai pada bulan Juni 2009 adalah sebanyak 428 orang.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi**  
**Kabupaten Banyumas menurut jenis kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah				Jumlah
		PNS	CPNS	PTT	POCOKAN	
1.	Laki – laki	103	103	36	94	336
2.	Perempuan	35	43	14	-	92
	J u m l a h	138	146	50	94	428

Sumber : DinasPerindustrian, perdagangan dan koperasi, 2009

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah pegawai perempuan dimana jumlah pegawai laki-laki berjumlah 336 yang terdiri dari 138 orang PNS, 146 orang CPNS, 50 orang Honorer PTT, 94 orang Tenaga Honorer Pocokan sedangkan pegawai perempuan berjumlah 92 orang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas jumlah pegawai yang menempati Kantor di Jalan Gatot Subroto No. 102 sebanyak 121 orang, sedangkan sebanyak 307 orang tersebar pada 25 pasar di Kabupaten Banyumas.

2. Struktur pegawai berdasarkan tingkat pendidikan formal

Untuk mendukung terwujudnya perencanaan strategis Dinas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas melalui beberapa program kerjanya, maka diperlukan beberapa pegawai yang memiliki keahlian dan kemampuan yang cukup, sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Keadaan ini akan tercermin dari latar belakang pendidikan yan mereka miliki.



Berdasarkan tingkat pendidikan formal yang telah ditempuh, pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas terbagi kedalam jenjang pendidikan seperti tabel dibawah ini

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas menurut tingkat pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah				Jumlah
		PNS	CPNS	PTT	POCOKAN	
2.	PASCA SARJANA/S2	7	-	-	-	7
3.	SARJANA	35	1	1	3	40
4.	DIPLOMA III	12	53	2	1	68
5.	SLTA	54	1	6	31	92
6.	SLTP	26	42	7	19	94
7.	SD	1	49	34	39	144
	Jumlah	138	146	50	94	428

Sumber : Dinas Perindustrian, perdagangan dan koperasi, 2009

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pendidikan pegawai mayoritas berpendidikan Sekolah Dasar sebanyak 144 orang dari total pegawai yang berjumlah 428 pegawai, hal ini dikarenakan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas sangat membutuhkan para pegawai yang lebih berpengalaman di daerah khususnya di daerah pasar sehingga para pegawai dinas ini ditempatkan di pasar yang tersedia di kabupaten banyumas. Selanjutnya jumlah pegawai berpendidikan SLTP berjumlah 94 orang, SLTA berjumlah 92 orang, Diploma III berjumlah 68 orang, Sarjana Berjumlah 40 orang dan Pasca sarjana 2 berjumlah 7 orang. Selain itu tabel II.4 menjelaskan mengenai penyebaran fungsi yang dijalankan berdasarkan atas pendidikan yang dimiliki oleh setiap pegawai yaitu:

**Tabel 2.4**  
**Pernyebaran tingkat pendidikan Pegawai di lingkungan Dinas**  
**Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas**

No	Jabatan dalam organisasi	Tingkat Pendidikan						JML
		S2	S1	D 3	SLTA	SLTP	SD	
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris/Kabid	4	2	-	-	-	-	6
3.	Kasubag/Kasi/UPTD	1	14	6	1	-	-	23
4.	Fungsional	-	1	-	-	-	-	1
5.	Staf	1	19	1	68	47	50	186
6.	PTT	-	1	2	5	40	44	48
7.	Tenaga Pocokan	-	3	-	52	-	39	94
	<b>J u m l a h</b>	7	40	9	126	87	133	428

Dengan begitu diharapkan akan dapat mendukung tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

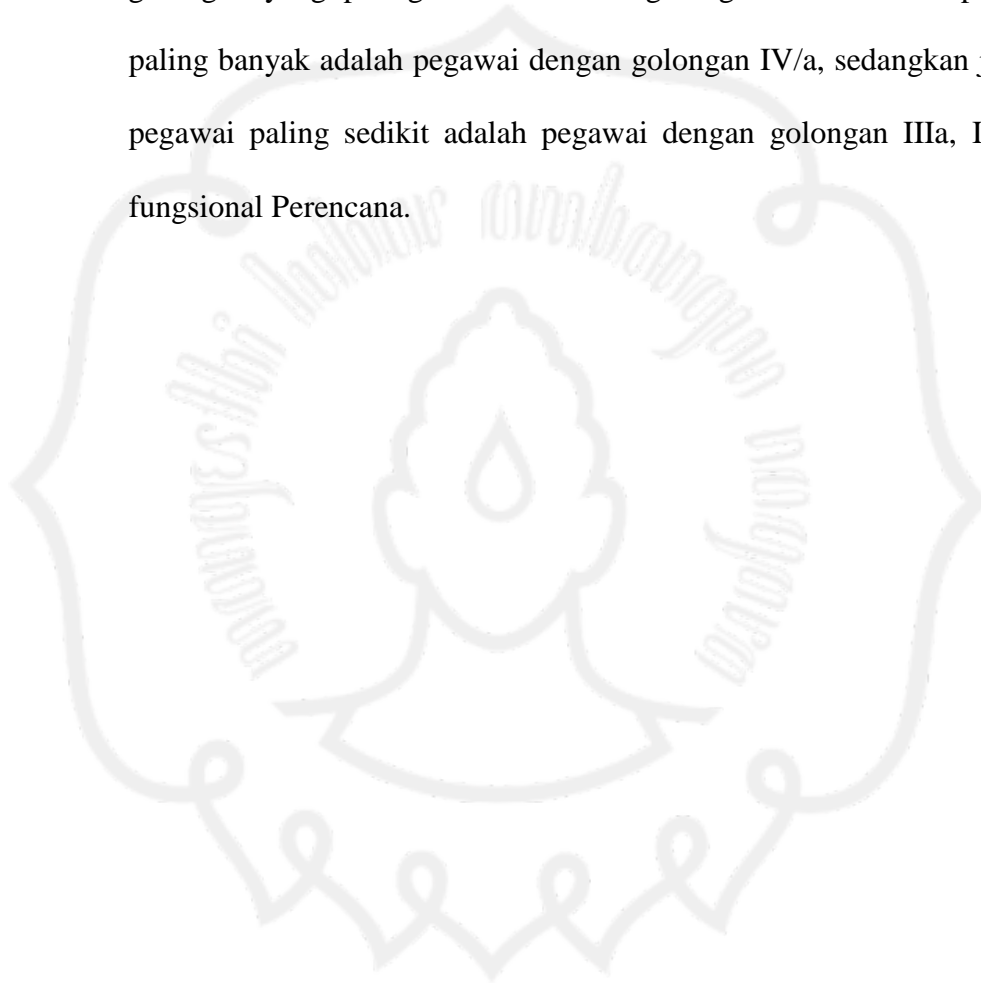
### 3. Struktur pegawai berdasarkan Kepangkatan / Golongan

Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas terbagi kedalam beberapa pangkat / golongan sebagaimana mestinya layaknya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berikut ini tabel pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas berdasarkan kepangkatan atau golongan :

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi**  
**Kabupaten Banyumas menurut Eselon dan Fungsional**

No	Tingkat Eselon / Fungsional	Jumlah
1.	IV b	2
2.	IV a	21
3.	III b	5
4.	III a	1
5.	II a	1
6.	Fungsional Perencana	1
	<b>J u m l a h</b>	<b>31</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas menurut eselon dan fungsional berjumlah 31 pegawai. Pegawai yang memiliki jangkauan golongan tertinggi adalah golongan IV/b dan jangkauan golongan yang paling rendah adalah golongan II/a. Jumlah pegawai paling banyak adalah pegawai dengan golongan IV/a, sedangkan jumlah pegawai paling sedikit adalah pegawai dengan golongan IIIa, IIa dan fungsional Perencana.



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

Sektor industri dan perdagangan merupakan salah satu penggerak utama dalam proses perekonomian untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan nilai tambah, pengembangan kewirausahaan, penyerapan tenaga kerja serta mengembangkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut maka Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Dinperindakop) Kabupaten Banyumas memerlukan adanya suatu Rencana strategis (Renstra).

Perencanaan strategis disusun sebagai dasar pelaksanaan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Dinperindakop Kabupaten Banyumas tahun 2008 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinperindakop Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 disusun berpedoman pada visi, misi dan program pembangunan Kepala Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten banyumas dan berbagai kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan penyusunan perencanaan pembangunan bidang industri, perdagangan, pasar, koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) di Kabupaten Banyumas.

Pelaksanaan Rencana strategis yang telah dibuat selama kurun waktu 5 tahun ini dijabarkan setiap tahunnya, tugas yang dilakukan setiap tahunnya adalah

dengan menjabarkan rencana strategis 2008-2013 dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Penetapan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Renstra Tahun 2008-2013 dan Renja Tahun 2008-2009 berisikan mengenai berbagai program dan kegiatan. Program ini berisikan mengenai perumusan gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan disertai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang mengatur kewenangan, tanggung jawab, waktu, sarana dan prasarana. Pada setiap program yang dilakukan ada beberapa kegiatan yang bersangkutan untuk dilaksanakan berdasarkan atas program tersebut.

Pembahasan mengenai analisis perbandingan antara Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2008-2013 dengan Rencana kerja (Renja) Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas studi kasus Program dan Kegiatan dalam Renstra Tahun 2008-2013 dan Renja Tahun 2008 dan 2009 akan dijabarkan ke dalam tiga bagian yaitu : Pertama, analisa dokumen mengenai : Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009, Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 dibagi menjadi dua bagian yaitu mengenai Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 dan Jumlah Program dan Kegiatan Tambahan pada Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas. Kedua, analisa wawancara mengenai Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 dan Program dan Kegiatan Tambahan pada Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas. Ketiga,

Pembahasan mengenai Analisis perbandingan Renstra Tahun 2008-2013 dan Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas, berdasarkan pada Jumlah program dan kegiatan yang terlaksana dan tidak terlaksana serta Tambahan yang terdapat pada Program dan Kegiatan pada Renstra dan Renja.

Lebih jelasnya mengenai Analisis perbandingan Renstra Tahun 2008-2013 Terhadap Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas maka terlebih dahulu peneliti akan membahas mengenai Renstra Tahun 2008-2013 Dinperindakop Kabupaten Banyumas.

Jumlah Keseluruhan Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Renstra yaitu berjumlah 15 program dengan 615 kegiatan. Jumlah ini kemudian dijabarkan dalam setiap tahunnya terdapat 15 program dengan 123 kegiatan. Program dan kegiatan dalam Renstra yang akan dilaksanakan oleh Dinperindakop Kabupaten Banyumas yaitu sebagai berikut.

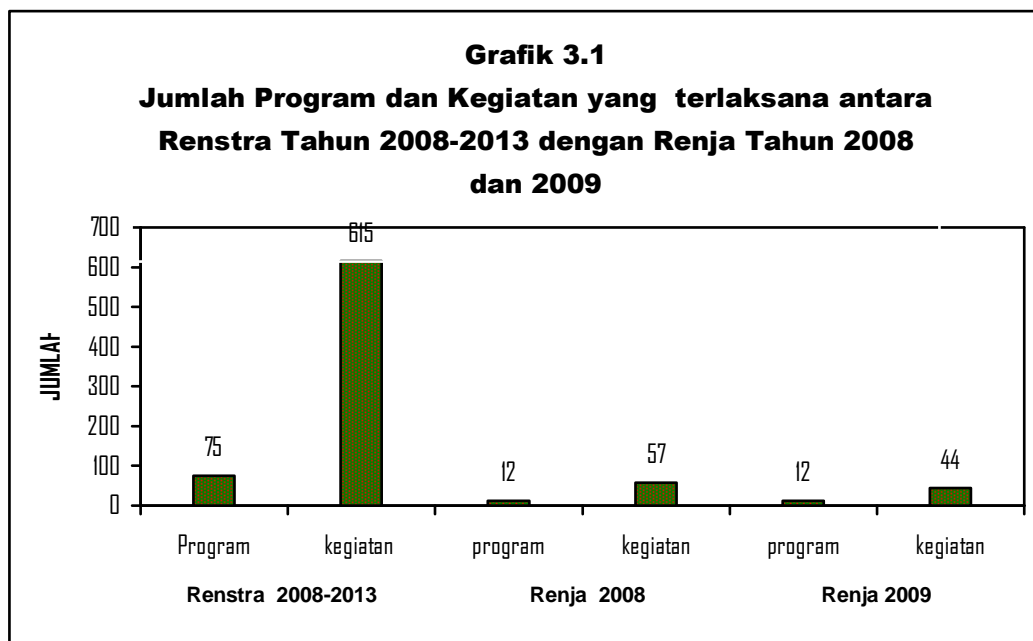
**Tabel 3.1**  
**Jumlah Program dan Kegiatan Renstra Tahun 2008-2013 Dinperindakop Kabupaten Banyumas**

No.	Program Dinperindakop	Jumlah Kegiatan
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	15
2.	Peningkatam sarana dan prasarana aparatur	6
3.	Peningkatan disiplin pegawai	2
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1
5.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan	4
6.	keuangan	8
7.	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	13
8.	Pengembangan industri kecil menengah (IKM)	4
9.	Penataan struktur industri	5
10.	Peningkatan kemampuan teknologi industri	8
11.	Pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri	10
12.	Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	8
13.	Pengembangan sentra-sentra industri potensial	27
14.	Penguatan, pengembangan, pengawasan koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM)	10
15.	Penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	2
Jumlah keseluruhan kegiatan		123

*Sumber: Diolah dari formulir Rencana Strategis Tahun 2008-2013 Dinperindakop Kabupaten Banyumas Bidang SUB BINA PROGRAM*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada Renstra Dinperindakop Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 terdapat 15 program dengan 123 kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya mengenai kegiatan yang terdapat pada setiap program tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.

Program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra Tahun 2008-2013 tersebut dituangkan ke dalam Renja Tahun 2008 dan 2009 yang dilaksanakan setiap tahunnya. Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana antara Renstra dengan Renja dapat dilihat Pada grafik 3.1 dibawah ini sebagai berikut :



*Sumber: Diolah dari formulir Renstra Tahun 2008-2013 dan Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas Bidang SUB BINA PROGRAM*

Pada grafik 3.1 bila dilihat pada Jumlah Program dan Kegiatan keseluruhan pada Renstra yaitu 75 program yang ditargetkan setiap tahunnya yaitu 15 program yang harus dilaksanakan, dengan jumlah keseluruhan kegiatan yaitu 615 kegiatan yang ditargetkan setiap tahunnya berjumlah 123 kegiatan. Renstra Tahun 2008-2013 yang setiap tahunnya ditargetkan dengan 15 program yang dijabarkan ke dalam Renja Tahun 2008 dan 2009 program yang dilaksanakan masing-masing berjumlah 12 program. Sedangkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Renstra Tahun 2008-2013 berjumlah 123 kegiatan, tetapi pada Renja Tahun 2008 berjumlah 57 kegiatan dan Renja Tahun 2009 berjumlah 44 kegiatan yang dilaksanakan. Lebih jelasnya mengenai analisis keterkaitan Renstra Tahun 2008-2013 terhadap Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas dapat dijelaskan dibawah ini.



### 3.1 Analisa Dokumen

Analisa dokumen ini dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui perbandingan Jumlah Program dan kegiatan yang terdapat antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009. Analisis keterkaitan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas dapat dilakukan dengan menganalisa dokumen mengenai : Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009, Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 dan Jumlah Program dan Kegiatan Tambahan Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas.

#### 3.1.1 Program dan Kegiatan yang terlaksana antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009.

Renstra Tahun 2008-2013 yang berisikan 15 program dengan 123 kegiatan yang dituangkan dalam Renja tahun 2008 dan 2009 tidak seluruhnya dari program dan kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mengetahui mengenai analisis perbandingan Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 terlebih dahulu peneliti mencari jumlah program dan kegiatan yang terkait antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009.

Pada grafik 3.1 seperti yang telah diketahui Jumlah Program dan kegiatan yang terlaksana antara Renstra tahun 2008-2013

dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 terdapat 12 program dengan 57 kegiatan pada Renja Tahun 2008 dan 44 kegiatan pada Renja Tahun 2009, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini.

**a. Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008**

Jumlah program dan kegiatan yang terlaksana antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

**TABEL 3.2**  
**Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008**

No.	Program	Jumlah
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	15
2.	Peningkatam sarana dan prasarana aparatur	6
3.	Peningkatan disiplin pegawai	2
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-
5.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	4
6	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	6
7.	Pengembangan industri kecil menengah (IKM)	3
8.	Penataan struktur industri	-
9.	Peningkatan kemampuan teknologi industri	2
10.	Pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri	6
11.	Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	2
12.	Pengembangan sentra-sentra industri potensial	5
13.	Penguatan, pengembangan, pengawasan koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM)	-
14.	Penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif	5
15.	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1
Jumlah		57

*Sumber: Diolah dari formulir Rencana Strategis Tahun 2008-2013 Dinperindakop Kabupaten Banyumas dan Renja Tahun 2008 Bidang SUB BINA PROGRAM*

Untuk lebih jelasnya mengenai program dan kegiatan yang terkait pada Renja Tahun 2008 dapat dilihat pada Lampiran 2.

Presentase mengenai jumlah program dan kegiatan yang terlaksana antara Renstra tahun 2008-2013 dan Renja Tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Presentase Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana antara Renstra tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008**

Renja Tahun 2008	Jumlah	Presentase
Program	12	80 %
Kegiatan	57	46 %

*Sumber: Diolah dari formulir Renja Tahun 2008 Dinperindakop Kabupaten Banyumas Bidang SUB BINA PROGRAM*

Jumlah program yang terlaksana antara Renstra tahun 2008-2013 dengan Renja tahun 2008 menunjukkan bahwa 80% program tersebut terdapat pada Renstra, ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara Renstra dan Renja. Sedangkan kegiatan pada Renja menunjukkan 46% kegiatan yang terlaksana pada Renstra, ini menandakan adanya ketidakterkaitan antara Renstra dan renja karena kegiatan yang dilakukan kurang dari 50% kegiatan yang tidak dilaksanakan berdasarkan Renstra Tahun 2008-2013.

**b. Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2009**

Hasil analisa dokumen yang peneliti lakukan Jumlah pada program dan kegiatan yang terlaksana antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini :

**Tabel 3.4**

**Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2009**

No.	Program	Jumlah
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	15
2.	Peningkatam sarana dan prasarana aparatur	6
3.	Peningkatan disiplin pegawai	–
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	–
5.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	–
6	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	2
7.	Pengembangan industri kecil menengah (IKM)	2
8.	Penataan struktur industri	1
9.	Peningkatan kemampuan teknologi industri	1
10.	Pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri	3
11.	Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	4
12.	Pengembangan sentra-sentra industri potensial	2
13.	Penguatan, pengembangan, pengawasan koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM)	3
14.	Penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif	3
15.	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	2
	<b>Jumlah</b>	<b>44</b>

*Sumber: Diolah dari formulir Rencana Strategis Tahun 2008-2013 Dinperindakop Kabupaten Banyumas dan Renja 2009 Bidang SUB BINA PROGRAM*

Lebih jelasnya mengenai jumlah program dan kegiatan yang a terlaksana ntara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja tahun 2009 terdapat pada lampiran 3 (Diolah berdasarkan pada formulir Renstra tahun 2008-2013 dan Renja tahun 2009). Pada Tabel 3.5 dibawah ini akan disajikan presentase jumlah program dan kegiatan yang terkait antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Presentase Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2009**

Renja Tahun 2009	Jumlah	Presentase
------------------	--------	------------

Program	12	80 %
Kegiatan	44	36 %

Sumber: Diolah dari formulir Renja Tahun 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas Bidang SUB BINA PROGRAM

Hasil presentase diatas menunjukkan adanya keterkaitan antara Renstra dengan Renja Tahun 2009 karena menghasilkan 80 % dari program yang dilaksanakan berasal dari Renstra tahun 2008-2013. Sedangkan terjadi ketidakterikatan pada kegiatan Renja 2009 yang dilaksanakan karena kegiatan yang dilaksanakan berjumlah 36% atau kurang dari 50% kegiatan yang mempunyai keterkaitan dengan Renstra Tahun 2008-2013.

### **3.1.2 Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja tahun 2008 dan 2009.**

Jumlah program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra Tahun 2008-2013 seperti yang dijelaskan pada Tabel 3.1 menerangkan adanya jumlah program dan kegiatan tersebut secara keseluruhan yaitu terdapat 15 program dan 123 kegiatan. Hasil analisa dokumen mengenai yang terdapat pada Renja Tahun 2008 dan 2009 menjelaskan bahwa Renja Tahun 2008 pada Tabel 3.2 program dan kegiatan yang terlaksana dengan renstra berjumlah 12 program dengan 57 kegiatan, sedangkan pada Renja Tahun 2009 pada Tabel 3.4 program dan kegiatan yang terlaksana dengan Renstra berjumlah 12 program dengan 44 kegiatan.

Bila dilihat dari jumlah program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra tersebut menggambarkan adanya program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Renja Tahun 2008 dan 2009, Maka berikut akan dilakukan analisa dokumen mengenai jumlah program dan kegiatan yang tidak terlaksana antara Renstra tahun 2008-2013 dengan Renja tahun 2008 dan 2009 yaitu dibagi menjadi 2 bagian yaitu mengenai jumlah program dan kegiatan yang tidak terlaksana antara Renstra tahun 2008-2013 dengan Renja tahun 2008 dan 2009 dan Program dan Kegiatan Tambahan tahun 2008 dan 2009.

**a. Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana antara Renstra tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008**

Jumlah Program dan kegiatan yang tidak terlaksana antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008, dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini :

**TABEL 3.6**  
**Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana antara Renstra tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008**

No.	Program	Jumlah
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	–

2.	Peningkatam sarana dan prasarana aparatur	–
3.	Peningkatan disiplin pegawai	–
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1
5.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	–
6.	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	2
7.	Pengembangan industri kecil menengah (IKM)	10
8.	Penataan struktur industri	4
9.	Peningkatan kemampuan teknologi industri	3
10.	Pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri	2
11.	Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	8
12.	Pengembangan sentra-sentra industri potensial	3
13.	Penguatan, pengembangan, pengawasan koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM)	27
14.	Penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif	5
15.	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1
Jumlah		66

Sumber: Diolah dari formulir Rencana Strategis Tahun 2008-2013 Dinperindakop Kabupaten Banyumas dan RenjaTahun 2008 Bidang SUB BINA PROGRAM

Untuk lebih jelasnya mengenai program dan kegiatan yang tidak terlaksana antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja tahun 2008 dapat dilihat pada lampiran 3. Pada Tabel 3.7 dibawah ini akan ditampilkan presentase jumlah program dan kegiatan yang tidak terlaksana antara renstra tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008.

**Tabel 3.7**  
**Presentase Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana antara renstra tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008**

Renja Tahun 2008	Jumlah	Presentase
Program	3	20%
Kegiatan	66	54%

Sumber: Diolah dari formulir Rencana Kerja Tahun 2008-2013 Dinperindakop Kabupaten Banyumas dan Renja Tahun 2008 Bidang SUB BINA PROGRAM

Jumlah Program yang tidak terlaksana antara Renstra dengan Renja Tahun 2008 Renstra berjumlah 20%, sedangkan kegiatan

yang tidak dilaksanakan berjumlah 54%. Banyaknya kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Renstra menandakan adanya faktor-faktor penghambat.

**b. Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana antara Renstra tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2009.**

Pada Tabel 3.8 akan ditampilkan jumlah program dan kegiatan yang tidak terlaksana antara Renstra tahun 2008-2013 dengan Renja tahun 2009 yaitu sebagai berikut :

**TABEL 3.8**  
**Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana antara Renstra tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2009**

No.	Program	Jumlah
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	=
2.	Peningkatam sarana dan prasarana aparatur	=
3.	Peningkatan disiplin pegawai	2
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1
5.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	4
6.	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	6
7.	Pengembangan industri kecil menengah (IKM)	11
8.	Penataan struktur industri	3
9.	Peningkatan kemampuan teknologi industri	4
10.	Pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri	5
11.	Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	6
12.	Pengembangan sentra-sentra industri potensial	6
13.	Penguatan, pengembangan, pengawasan koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM)	24
14.	Penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif	7
15.	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	=
<b>Jumlah</b>		<b>79</b>

*Sumber: Diolah dari formulir Renja Tahun 2008-2013 Dinperindakop Kabupaten Banyumas dan Renja Tahun 2009 Bidang SUB BINA PROGRAM*

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah program dan kegiatan yang tidak terlaksana antara Renstra tahun 2008-2013 dengan Renja tahun 2008 dapat dilihat pada lampiran 3. Pada Tabel 3.9



dibawah ini akan ditampilkan presentase jumlah program dan kegiatan yang tidak terlaksana antara renstra tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2009.

**Tabel 3.9**  
**Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana antara renstra tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2009**

Renja Tahun 2009	Jumlah	Presentase
Program	3	20%
Kegiatan	79	64%

*Sumber: Diolah dari formulir Renja Tahun 2008-2013 Dinperindakop Kabupaten Banyumas dan Renja Tahun 2009 Bidang SUB BINA PROGRAM*

Program yang tidak terlaksana pada Renja Tahun 2009 berjumlah 20%, sedangkan kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Renstra Tahun 2008-2013 berjumlah 64% ini menandakan adanya faktor penghambat pada ketidakterikatan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2009 karena lebih dari 50% kegiatan tidak terlaksana.

**c. Program dan Kegiatan Tambahan Renja Tahun 2008-2009**

Renstra yang telah dibuat oleh Dinperindakop selama 5 tahun yang kemudian dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Renja (Rencana Kerja) berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang terdapat dalam Renja yang merupakan deskripsi dari Renstra yang telah dibuat ada beberapa kegiatan maupun program yang dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang terdapat dalam renja Tahun 2008-2009 tidak seluruhnya merupakan program dan kegiatan

yang berasal dari Renstra, karena pada Renja tahun 2008-2009 terdapat program dan kegiatan tambahan yang dilaksanakan. Adapun penjelasan program dan kegiatan tambahan pada Renja tahun 2008-2009 sebagai berikut.

Tabel 3.10 dibawah ini akan menjelaskan program dan kegiatan tambahan pada Renja Tahun 2008 sebagai berikut :

**TABEL 3.10**  
**Program dan Kegiatan Tambahan Renja Tahun 2008**

No.	Program	Jumlah
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	1
2.	Peningkatam sarana dan prasarana aparatur	-
3.	Peningkatan disiplin pegawai	-
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-
5.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	-
6.	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1
7.	Pengembangan industri kecil menengah (IKM)	1
8.	Penataan struktur industri	-
9.	Peningkatan kemampuan teknologi industri	1
10.	Pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri	5
11.	Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	-
12.	Pengembangan sentra-sentra industri potensial	-
13.	Penguatan, pengembangan, pengawasan koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM)	-
14.	Penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif	2
15.	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1
16.	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah.	11
Jumlah		23

*Sumber: Diolah dari formulir Renja Tahun 2008 Dinperindakop Kabupaten Banyumas Bidang SUB BINA PROGRAM*

Pada program dan kegiatan Renja Tahun 2008 terdapat 1 program tambahan yaitu pengembangan sistem usaha mikro kecil menengah yang terdiri dari 11 kegiatan. Selain itu pula adapun kegiatan tambahan pada program yang terdapat dalam Renstra. Keseluruhan program tambahan yang dilaksanakan pada Renja

Tahun 2008 terdapat 23 kegiatan. Untuk lebih jelasnya mengenai Program dan kegiatan tambahan Renja Tahun 2008 dapat dilihat pada lampiran 4.

Program dan kegiatan tambahan pada Renja Tahun 2009 akan ditampilkan pada Tabel 3.11 dibawah ini :

**Tabel 3.11**  
**Program dan Kegiatan Tambahan Renja 2009**

No.	Program	Jumlah
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	-
2.	Peningkatam sarana dan prasarana aparatur	-
3.	Peningkatan disiplin pegawai	-
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-
5.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	-
6.	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	5
7.	Pengembangan industri kecil menengah (IKM)	3
8.	Penataan struktur industri	-
9.	Peningkatan kemampuan teknologi industri	-
10.	Pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri	-
11.	Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	-
12.	Pengembangan sentra-sentra industri potensial	-
13.	Penguatan, pengembangan, pengawasan koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM)	6
14.	Penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif	2
15.	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	-
16.	Penyusunan dan pembaharuan peraturan perundangan di daerah	2
Jumlah		18

Sumber: Diolah dari formulir Renja Tahun 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas dan Bidang SUB BINA PROGRAM

Pada Renja Tahun 2009 terdapat 1 program tambahan yaitu penyusunan dan pembaharuan peraturan di daerah yang terdiri dari 2 kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan tambahan pada Renja tahun 2009 berjumlah 18 kegiatan yang berada dalam masing-masing program tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 4.

Analisa dokumen yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan atas dokumen yang telah diperoleh dari Dinperindakop Kabupaten Banyumas, untuk mengetahui Jumlah Program dan Kegiatan yang terkait Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008-2009, Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terkait Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008-2009 dan Program dan Kegiatan Tambahan pada Renja Tahun 2008-2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas.

Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana dan tidak terlaksana antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008-2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas, maka dapat dilihat secara jelas mengenai keterkaitan maupun ketidakterkaitan program dan kegiatan anatar Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008-2009. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 3.12 mengenai Analisis perbandingan Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana dan tidak terlaksana antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009.

**Tabel 3.12**  
**Analisis Perbandingan Program dan Kegiatan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009**

Analisis Keterkaitan	Renja Tahun 2008				Renja Tahun 2009			
	Program		Kegiatan		Program		Kegiatan	
	Jumlah	Presentase (%)	Jumlah	Presentase (%)	Jumlah	Presentase (%)	Jumlah	Presentase
- Terlaksana	12	80	57	46	12	80	44	36
- Tidak terlaksana	3	20	66	54	3	20	79	64
Jumlah Keseluruhan	15	100	123	100	15	100	123	100

Keterangan :  $N_{program} = 15$

$N_{kegiatan} = 123$

Berdasarkan Renstra Tahun 2008-2013

Tabel 3.12 mengenai Analisis Perbandingan Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana dan tidak terlaksana antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 yaitu bila dilihat pada segi program yang terdapat pada Renja Tahun 2008 dan 2009 terdapat keterkaitan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 yaitu 80% sedangkan bila dilihat pada segi kegiatan tidak adanya keterkaitan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 karena jumlah kegiatan yang terlaksana antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 kurang dari 50% yaitu pada Renja Tahun 2008 berjumlah 46% dan Renja Tahun 2009 berjumlah 36 %, hal ini menyatakan bahwa adanya faktor penghambat sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.. Jumlah kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Renja Tahun 2008 dan 2009 yaitu pada renja tahun 2008 berjumlah 54 kegiatan sedangkan pada Renja Tahun 2009 berjumlah 79 kegiatan, hal ini disebabkan karena adanya kegiatan tambahan yang dilaksanakan oleh Dinperindakop karena adanya perubahan peraturan yang dilaksanakan oleh perda sehingga kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinperindakop dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya. Kegiatan Tambahan pada Renja Tahun 2008 salah satunya yang mendesak untuk dilaksanakn yaitu pendampingan bantuan bergulir untuk masyarakat miskin yang produktif dan kegiatan tambahan pada Renja 2009 yaitu penyusunan Perda tentang bantuan bergulir bagi UMKM.

Program dan kegiatan tambahan pada Renja Tahun 2008 dan 2009 yang dilaksanakan oleh Dinperindakop Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada Tabel 3.13 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.13**  
**Program dan Kegiatan Tambahan pada Renja Tahun 2008-2009**

Renja Tahun 2008		Renja Tahun 2009	
Jumlah		Jumlah	
Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
1	23	1	18

*Sumber diolah berdasarkan Renja tahun 2008-2009*

Tabel 3.13 pada Renja Tahun 2008-2009 terdapat 1 program tambahan berjumlah yang dilaksanakan yaitu pada Renja Tahun 2008 terdapat program pengembangan sistem usaha mikro kecil menengah dan Renja Tahun 2009 terdapat program Penyusunan dan pembaharuan peraturan perundangan di daerah, masing-masing program tambahan yang terdapat pada Renja Tahun 2008 dan 2009 tidak terdapat pada Renstra Tahun 2008-2013. Sedangkan kegiatan tambahan yang dilaksanakan pada Renja Tahun 2008 berjumlah 23 kegiatan dan Renja Tahun 2009 berjumlah 18 kegiatan yang dilaksanakan. Program dan kegiatan tambahan yang dilaksanakan pada Renja Tahun 2008 dan 2009 akan dibahas pada analisa wawancara yang dilakukan peneliti kepada para karyawan Dinperindakop Kabupaten Banyumas.

### 3.2 Analisa Wawancara

Wawancara dilakukan kepada Dinperindakop untuk mengadakan *cross check* pada dokumen (formulir). Analisa wawancara dilakukan untuk mengetahui alasan Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terkait Antara

Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008-2009 serta Program dan Kegiatan Tambahan pada Renja Tahun 2008-2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas.

### **3.2.1 Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terkait Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009**

Analisa wawancara untuk mengetahui alasan Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terkait Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 dilakukan pada para karyawan di Dinperindakop Kabupaten Banyumas.

Wawancara 1 dilakukan kepada kepala Dinperindakop yang terdapat pada lampiran 6 dan diinterpretasikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Program tersebut tetap dilaksanakan oleh bagian Ketatausahaan.
2. Tidak adanya program pengganti
3. Program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Renja Tahun 2008 dan 2009 dikarenakan kurangnya dana, tempat, kesadaran masyarakat, kurangnya informasi dan kurangnya peranan pada salah satu lembaga.
4. Penataan struktur industri tidak dilaksanakan karena program ini merupakan program penggabungan antara

pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri selain itu pula pengembangan industri kecil dan menengah.

5. Kurangnya dana yang berasal dari APBD
6. karena adanya masa transisi yang dialami oleh DINPERINDAKOP dan kurangnya dana dalam membiayai program dan kegiatan tersebut.
7. Program wajib yang harus dilakukan oleh setiap pegawai, hal ini membutuhkan kesadaran pada setiap diri pegawai
8. Setiap program dan kegiatan yang tidak dilakukan karena adanya keterbatasan dana yang dimiliki.

Faktor utama yang menyebabkan program dan kegiatan tidak terlaksana pada Renja Tahun 2008 dan 2009 karena kurangnya dana dari APBD yang diberikan oleh pemerintah, tetapi tidak menutup kemungkinan program dan kegiatan yang tidak dicantumkan pada Renja tahun 2008 dan 2009 dapat dilaksanakan pada Renja tahun berikutnya.

Wawancara 2 dilakukan kepada Kasi Bina Program Dinperindakop yang terdapat pada lampiran 7 dan diinterpretasikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. RENSTRA dan RENJA hanya sebuah rencana yang baru akan dibuat untuk menggambarkan kegiatan dan



program yang akan dilaksanakan tetapi tidak semua program dan kegiatan akan dilaksanakan karena dinas bekerja berdasarkan penetapan program.

2. Program tambahan dilakukan karena adanya perubahan yang mendesak menyesuaikan dengan PERDA di daerah dan adanya kebutuhan saat itu.
3. Program tersebut tetap dilaksanakan oleh bagian Ketatausahaan.
4. Tidak adanya program pengganti
5. Program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Renja Tahun 2008 dan 2009 dikarenakan kurangnya dana yang diberikan
6. Bukan merupakan suatu program tetapi merupakan suatu kesadaran yang harus dimiliki oleh setiap pegawai.

Penyusunan Renstra dan Renja hanya merupakan suatu rencana yang akan dilakukan, Dinperindakop melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan pada penetapan program. Banyaknya program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan karena kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur tidak dicantumkan dalam Renja karena program ini

merupakan program tahunan yang dilaksanakan oleh bidang ketatausahaan.

Wawancara 3 dilakukan kepada staff Bina Program Dinperindakop yang terdapat pada lampiran 8 dan diinterpretasikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. RENSTRA dan RENJA tidak dilakukan itu baru merupakan suatu rencana, yang dilaksanakan hanya yang ada pada penetapan program
2. Program tersebut program tahunan yang dilakukan
3. Kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah
4. Tidak adanya program pengganti
5. program peningkatan disiplin pegawai merupakan hal wajib yang perlu dilakukan oleh setiap karyawan.

Wawancara 4 dilakukan kepada kasubag umum Dinperindakop mengenai kejelasan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang tidak dicantumkan kedalam Renja tahun 2008 dan 2009, terdapat pada lampiran 9 dan diinterpretasikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Program kapasitas sumber daya aparatur itu merupakan masalah pegawai fungsional, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan , dalam hal

ini berisikan mengenai pembayaran honor ketatausahaan.

2. Tidak adanya program lain untuk menggati program kapasitas sumber daya aparatur, karena merupakan salah satu kegiatan rutin.

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur merupakan suatu program rutin yang dilakukan sehingga tidak dicantumkan ke dalam Renja Tahun 2008 dan 2009 tetapi tetap dimasukkan ke dalam Renstra sebagai salah satu program yang harus dilaksanakan.

Faktor penghambat yang menyebabkan Ketidaksamaan Jumlah Program dan Kegiatan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 yaitu kurangnya anggaran (APBD) yang diberikan oleh pemerintah daerah. Ini dapat dilihat pada Tabel 3.14 mengenai Sosialisasi APBD Kabupaten Banyumas yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.14**  
**Sosialisasi APBD Kabupaten Banyumas**

RENJA	Input (Dana)	
	RENSTRA DINPERINDAKOP	APBD
RENJA 2008	Rp 7.945.675.000	Rp 5.806.006.500
RENJA 2009	Rp 8.807.687.900	Rp 6.184.500.000

*Sumber: (Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas, Sub bidang keuangan)*

Dari data yang ada diatas pada Rentra anggaran yang diperlukan untuk kegiatan dan program pada Renja Tahun 2008 adalah sebesar Rp 8.945.675.000 dan Renja Tahun 2009 dana

yang dibutuhkan Rp 9.807.687.900. Setelah disosialisasikan dengan berbagai pertimbangan, dana yang dikeluarkan pada APBD Kabupaten Banyumas untuk mendanai kegiatan dan program dalam Renja Tahun 2008 sebesar Rp 5.806.006.500 dan Renja Tahun 2009 yaitu Rp 6.184.500.000. Dana yang diperoleh dari APBD tersebut berakibat adanya program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Dinperindakop Kabupaten Banyumas.

### **3.2.2 Program dan Kegiatan Tambahan pada Renja Tahun 2008 dan 2009**

Analisa wawancara mengenai Program dan Kegiatan Tambahan pada Renja Tahun 2008 dan 2009 untuk mengadakan *cross check* pada dokumen (formulir). Wawancara 1 dilakukan kepada kepala Dinperindakop yang terdapat pada lampiran 6 dan diinterpretasikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Program tambahan dilakukan karena adanya perubahan yang mendesak menyesuaikan dengan PERDA di daerah dan adanya kebutuhan saat itu.
2. Kegiatan tambahan pada RENJA tahun 2008 dan 2009 karena adanya perubahan dari PERDA yang ada di daerah

Program dan kegiatan tambahan yang dilakukan karena adanya perubahan dari PERDA sehingga mewajibkan adanya

program dan kegiatan tambahan yang dilakukan pada tahun tersebut. Sehingga dinas harus dapat menyesuaikan dengan keadaan tersebut, ini juga dapat disebabkan karena adanya perubahan yang terjadi di daerah tersebut atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada.

Wawancara 2 dilakukan kepada Kasi Bina Program yang terdapat pada lampiran 7 dan diinterpretasikan oleh peneliti sebagai berikut Adanya faktor kondisi pada saat tersebut dan adanya perubahan yang dilakukan oleh PEMDA.

Wawancara 3 dilakukan kepada kasi bidang perdagangan yang terdapat pada lampiran 10 dan diinterpretasikan oleh peneliti sebagai berikut: Program tambahan dilakukan karena adanya peraturan dan perubahan yang harus dilakukan.

Wawancara yang peneliti lakukan kepada para pegawai, dari rata-rata jawaban yang diberikan yaitu karena adanya perubahan yang dilakukan oleh PEMDA setempat.

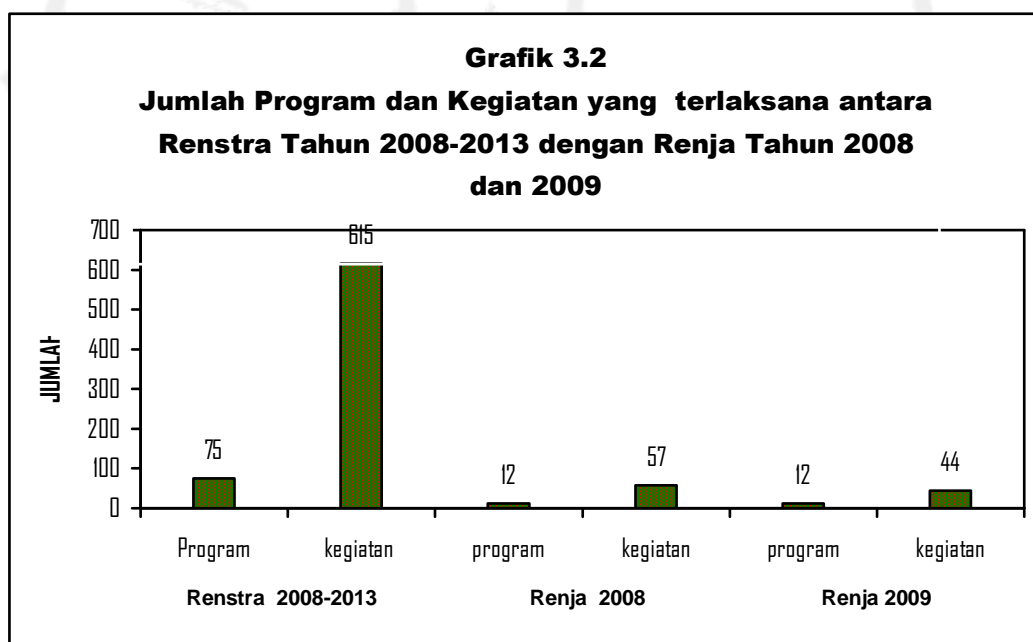
### **3.3 Pembahasan Analisis Keterkaitan Renstra Tahun 2008-2013 dan Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas.**

Pembahasan mengenai Analisis Keterkaitan Renstra Tahun 2008-2013 dan Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas dibagi menjadi 3 bagian yaitu : Jumlah Program dan Kegiatan yang

terlaksana Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009, Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 dan Program dan Kegiatan Tambahan pada Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas.

### 3.3.1 Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009.

Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 dapat dilihat pada Grafik 3.2 dibawah ini :



Sumber: Diolah dari formulir Renstra Tahun 2008-2013 dan Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas Bidang SUB BINA PROGRAM

Berdasarkan pada Garafik 3.2 bila dilihat pada Jumlah Program dan Kegiatan keseluruhan pada Renstra yaitu 75 program yang ditargetkan setiap tahunnya yaitu 15 program yang harus

dilaksanakan, dengan jumlah keseluruhan kegiatan yaitu 615 kegiatan yang ditargetkan setiap tahunnya berjumlah 123 kegiatan. Renstra Tahun 2008-2013 yang setiap tahunnya ditargetkan dengan 15 program yang dijabarkan ke dalam Renja Tahun 2008 dan 2009 program yang dilaksanakan masing-masing berjumlah 12 program. Sedangkan pada kegiatan tidak adanya keterkaitan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja tahun 2008 dan 2009 yaitu kegiatan yang tidak terlaksana kurang dari 50% yaitu 46% Renja Tahun 2008 dan 36% pada Renja Tahun 2009.

### **3.3.2 Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009**

Pada Grafik 3.2 menjelaskan mengenai Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009. Hasil analisa dokumen yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa 50% kegiatan tidak terkait antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop. Setelah melakukan wawancara kepada para pegawai terutama kepada Kepala Dinperindakop, kegiatan yang tidak terlaksana karena faktor utama yaitu kurangnya anggaran yang dimiliki untuk membiayai kegiatan tersebut walaupun banyak faktor lainnya tetapi faktor utama penyebab tidak dilaksanakannya kegiatan adalah anggaran yang diberikan. Program maupun kegiatan yang

tidak dilaksanakan pada Renja tahun 2008 dan 2009 akan dilaksanakan pada Renja tahun berikutnya.

Ketidakterkaitan Program dan Kegiatan Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 ditampilkan pada Tabel 3.15 dibawah ini :

**Tabel 3.15**  
**Ketidaktelaksanaan Program dan Kegiatan Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009**

Dokumen	Perbandingan			
	Program	Presentase	Kegiatan	Presentase
Renstra	15	100%	123	100%
Renja Tahun 2008	3	20%	66	54%
Renja Tahun 2009	3	20%	79	64%

*Sumber: Diolah dari formulir Renstra dan Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas Bidang SUB BINA PROGRAM*

Program yang tidak dilaksanakan pada Renja Tahun 2008 dan 2009 yaitu 20% dari 100% sehingga dalam hal program terdapat keterkaitan antara Renstra tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009. Sedangkan pada kegiatan antara Renstra dengan Renja ini menandakan faktor penghambat sangat berpengaruh, kegiatan yang tidak terkait pada Renja tahun 2008 berjumlah 54% kegiatan dan Renja Tahun 2009 yaitu 64% kegiatan. Selain itu pula kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2009 lebih besar dibandingkan tahun 2008 ( $64% > 54%$ ).

Hasil analisa dokumen dan wawancara yang peneliti lakukan mengenai program dan kegiatan tambahan pada Renja tahun 2008 dan 2009, peneliti menyimpulkan bahwa adanya program dan



kegiatan yang baru atau kegiatan tambahan yang dilakukan pada program yang terdapat pada Renstra dikarenakan adanya perubahan yang mendesak menyesuaikan dengan PERDA di daerah. Bila dilihat dari jumlah kegiatan tambahan yang dilakukan kegiatan tambahan yang dilakukan pada tahun 2008 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2009 yaitu pada tahun 2008 berjumlah 23 kegiatan dan pada tahun 2009 berjumlah 18 kegiatan. Ini dapat dilihat pada Tabel 3.16 program dan kegiatan tambahan pada Renja tahun 2008 dan 2009 sebagai berikut :

**Tabel 3.16**  
**Program dan Kegiatan Tambahan Renja tahun 2008 dan 2009**

Renja Tahun 2008		Renja Tahun 2009	
Jumlah		Jumlah	
Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
1	23	1	18

*Sumber diolah berdasarkan Renja tahun 2008 dan 2009*

Pembahasan mengenai analisis perbandingan program dan kegiatan yang mempunyai kesamaan, ketidaksamaan serta tambahan digunakan untuk mengetahui analisis keterkaitan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas. Sesuai dengan kerangka pikir peneliti untuk mengetahui mengenai analisis keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2008-2013 dengan Rencana kerja (Renja) Tahun 2008 dan 2009 diukur dari program dan kegiatan yang berdasar pada : jumlah Program dan Kegiatan yang terkait Antara Renstra Tahun 2008-2013

dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 dan Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terkait Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas, Program dan Kegiatan tambahan pada Renja Tahun 2008 dan 2009 merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang harus dilaksanakan karena adanya perubahan peraturan menyesuaikan dengan PERDA Kabupaten Banyumas. Pada Tabel 3.17 dibawah ini akan disajikan mengenai Analisa Dokumen Program dan Kegiatan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas, yaitu sebagai berikut :

**DILAMPIRAN**

Pada Tabel 3.17 mengenai Analisa Dokumen Program dan Kegiatan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas, maka kita dapat mengetahui secara keseluruhan Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009, Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 serta Program dan Kegiatan Tambahan pada Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas. Tabel 3.17 dapat digunakan dalam menganalisis keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2008-2013 dengan Rencana kerja (Renja) Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas studi kasus Program dan Kegiatan dalam Renstra Tahun 2008-2013 dan Renja Tahun 2008 dan 2009 seperti yang ada pada kerangka pikir peneliti, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.18 mengenai Perbandingan Jumlah dan Presentase Analisis Keterkaitan Program dan kegiatan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

**Tabel 3.18**  
**Perbandingan Jumlah dan Prosentase Analisis perbandingan Program dan kegiatan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas**

Jumlah Analisa Dokumen	Renja Tahun 2008				Renja Tahun 2008			
	Program		Kegiatan		Program		Kegiatan	
	N=15	(%)	N=123	(%)	N=15	(%)	N=123	(%)
Terlaksana	12	80	57	46	12	80	44	36
Tidak terlaksana	3	20	66	54	3	20	79	64
<b>Jumlah</b>	15	100	123	100	15	100	123	123

Bila dilihat pada Tabel 3.18 mengenai analisis perbandingan Program dan kegiatan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 dilihat dengan adanya jumlah analisa dokumen yang berdasarkan atas terlaksana dan tidak terlaksana antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009.

Bila dilihat pada program yang terdapat pada Renja Tahun 2008 dan 2009 adanya keterkaitan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 yaitu 80% sedangkan pada analisa dokumen kegiatan tidak adanya keterkaitan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 karena jumlah kesamaan kegiatan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008-2009 kurang dari 50% yaitu pada Renja Tahun 2008 berjumlah 46% dan Renja Tahun 2009 berjumlah 36 %, hal ini menyatakan bahwa adanya faktor penghambat yaitu kurangnya anggaran (APBD) yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Jumlah kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Renja Tahun 2008 dan 2009 yaitu pada renja tahun 2008 berjumlah 54 kegiatan sedangkan pada Renja Tahun 2009 berjumlah 79 kegiatan, hal ini disebabkan karena adanya kegiatan tambahan yang dilaksanakan oleh Dinperindakop karena adanya perubahan peraturan yang mendesak sesuai dengan kebutuhan daerah pada saat itu yang dilaksanakan oleh Perda sehingga kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinperindakop dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya. Kegiatan Tambahan pada Renja Tahun 2008 salah satunya yang mendesak untuk dilaksanakn yaitu pendampingan bantuan

bergulir untuk masyarakat miskin yang produktif dan kegiatan tambahan pada Renja 2009 yaitu penyusunan Perda tentang bantuan bergulir bagi UMKM.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2008-2013 dengan Rencana kerja (Renja) Tahun 2008- dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas studi kasus Program dan Kegiatan pada Renstra Tahun 2008-2013 dan Renja Tahun 2008 dan 2009 yang dikemukakan diperoleh maka kesimpulan akan dijabarkan ke dalam tiga bagian yaitu :

1. Jumlah Program dan Kegiatan yang terkait dan tidak terkait antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Analisis Keterkaitan Jumlah Program dan Kegiatan Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009**

Analisis Keterkaitan	Renja Tahun 2008				Renja Tahun 2009			
	Program		Kegiatan		Program		Kegiatan	
	Jumlah	Presentase (%)	Jumlah	Presentase (%)	Jumlah	Presentase (%)	Jumlah	Presentase
-Terkait	12	80	57	46	12	80	44	36
-Tidak Terkait	3	20	66	54	3	20	79	64
Jumlah Keseluruhan	15	100	123	100	15	100	123	100

Keterangan :  $N_{program} = 15$

$N_{kegiatan} = 123$

Berdasarkan Renstra Tahun 2008-2013

Analisis Keterkaitan Jumlah Program dan Kegiatan yang terkait dan tidak terkait Antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 yaitu :

- a. Dilihat pada segi program yang terdapat pada Renja Tahun 2008 dan 2009 adanya keterkaitan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 yaitu 80%.
  - b. Dilihat pada segi kegiatan tidak adanya keterkaitan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008 dan 2009 karena jumlah kegiatan yang terkait antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008-2009 kurang dari 50% yaitu pada Renja Tahun 2008 berjumlah 46% dan Renja Tahun 2009 berjumlah 36 %, hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran (APBD) yang diberikan oleh pemerintah daerah.
2. Program dan kegiatan tambahan yang dilakukan karena adanya perubahan dari PERDA sehingga mewajibkan adanya program dan kegiatan tambahan yang dilakukan pada tahun tersebut. Sehingga dinas harus dapat menyesuaikan dengan keadaan tersebut, ini juga dapat disebabkan karena adanya perubahan yang terjadi di daerah tersebut atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Jumlah program dan kegiatan tambahan dapat dilihat pada Tabel 4.2 yaitu:

**Tabel 4.2**  
**Program dan Kegiatan Tambahan Renja tahun 2008 dan 2009**

Renja Tahun 2008		Renja Tahun 2009	
Jumlah		Jumlah	
Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
1	23	1	18

Bila dilihat dari jumlah kegiatan tambahan yang dilakukan kegiatan tambahan yang dilakukan pada tahun 2008 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2009 yaitu pada tahun 2008 berjumlah 23 kegiatan dan pada tahun 2009 berjumlah 18 kegiatan.

3. Analisis Keterkaitan Renstra Tahun 2008-2013 dan Renja Tahun 2008 dan 2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.3 dibawah ini :



**DILAMPIRAN**



## 4.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mendorong keberhasilan program dan kegiatan yang terdapat pada Renja maka Dinperindakop perlu memaksimalkan terlebih dahulu kondisi lingkungan yang ada.
2. Program dan Kegiatan yang belum terlaksana pada Renstra dan Renja diharapkan dapat dilaksanakan pada rencana kerja tahun berikutnya.
3. Dalam penyusunan Rencana Strategi dan Rencana Kerja harus benar-benar di sesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki agar rencana strategi yang ada relevan dengan kondisi Kabupaten Banyumas.
4. Bagi pihak yang ingin melanjutkan penelitian berikutnya, peneliti menyarankan agar melaksanakan penelitian yang mengkaji Implementasi Program dan Kegiatan antara Renstra Tahun 2008-2013 dengan Renja Tahun 2008-2009 Dinperindakop Kabupaten Banyumas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akdon. 2007. *Strategic Management for Educational Management (Manajemen Strategik untuk Manajemen Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta
- Bryson, M John. 2007. "*Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*". Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_ . 2008. "*Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*". Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- David E, Mc Nabb. 2002. " *Research Methods in Public Administration and Nonprofit Management Quantitative and Qualitative Approaches*". New York : M, E, Sharpe, Inc
- Jauch, Lawrence R. dan William F. Glueck. 1999. *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta:UPP AMP YKPN
- Moleong,J.Lexy.2008. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT remaja Rosdakarya
- Muljadi, Arief. 2006. *Pokok-Pokok dan Ikhtisar Manajemen Stratejik Perencanaan dan Manajemen Kinerja*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Purwanto, Iwan. 2008. *Manajemen Strategi*. Bandung: Yrama Widya
- Robbins, Stephen P. dan Mary Coulter. 1999. *Manajemen Jilid 1*. Jakarta: Prenhallindo
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia
- Salusu, J. 1998. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Gramedia
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES
- Susanto, 2006, "*Metode Penelitian Sosial*", Surakarta : LPP UNS & UNS Press.
- Sutopo, HB. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Vincent Gaspersz. 2004. *Perencanaan Strategik Untuk Peningkatan Kinerja sektor Publik*. Jakarta: PT gramedia

#### **Sumber Lain :**

Jane E. Dutton and Robert B. Duncan. 2008. *Strategic Management Journal*, in *International Journal Strategic Planning Process On Strategic Change*, Vol. 8, No. 2 (Mar. - Apr., 2008 ), <http://www.worldacademicunion.com/journal/MSEM/msemVol02No04paper08.pdf>. Diakses Tanggal 5 Oktober 2009

John C, Camillus. 2008. *Multi-Objective Assessment Of Effectiveness*, in *International Journal Of Strategic Planning: a Discriminant Analysis Approach*. Vol. 29. No. 2. 347-372. 2008. <http://inderscience.metapress.com/app/home/contribution.asp?referrer=parent&backto=issue,3,7;journal,2,2;linkingpublicationresults,1:121098,1>. Diakses tanggal 5 Oktober 2009

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinperindakop Kabupaten Banyumas Tahun 2008

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2008 Tentang *Penjabaran Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Banyumas*.

Peraturan Bupati Banyumas No. 103 Tahun 2008 tentang *Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013*

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 tentang *tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan daerah*

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang *Rencana Kerja Pemerintah*

Rencana strategis (Renstra) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinperindakop Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2009.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

www.DadangSolihin.com. *Keterkaitan Dokumen Perencanaan.*  
<http://www.slideshare.net/DadangSolihin/keterkaitan-dokumen-perencanaan>. Diakses tanggal 17 Oktober 2009

www.slideshare.net. *Pentingnya Strategi Dan Akselerasi Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD.*  
<http://www.slideshare.net/DadangSolihin/pentingnya-strategi-dan-akselerasi-pembangunan-daerah-dalam-penyusunan-rpjmd>. Diakses tanggal 17 Oktober 2009

www.slideshare.net. *Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan UU 25 tahun 2004.*  
<http://www.slideshare.net/DadangSolihin/mechanisme-dan-proses-perencanaan-pembangunan-daerah-berdasarkan-uu-252004>. Diakses tanggal 17 Oktober 2009

www.slideshare.net. *Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006.*  
<http://www.slideshare.net/DadangSolihin/penyusunan-apbd-sesuai-uu-252004-uu-172003-dan-permendagri-132006>. Diakses tanggal 17 Oktober 2009